

LAPORAN AKHIR
KAJIAN PENGEMBANGAN USAHA KUMKM
KABUPATEN KULON PROGO



DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN KULON PROGO

2019



Laporan Akhir

Kajian Pengembangan Usaha KUMKM Kabupaten Kulon Progo

KAJIAN PENGEMBANGAN USAHA KUMKM

KABUPATEN KULON PROGO

Tim Peneliti :

1. Agung Wicaksono, S. Sn., M. Sn (TA Desain)

2. M. Rudi Nugroho, S.E., M. Sc (TA Ekonomi)



KATA PENGANTAR

Teriring puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, kami CV Multi Lisensi yang telah ditunjuk oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo untuk melaksanakan pekerjaan Kajian Pengembangan Usaha Koperasi dan UMKM, telah berhasil menyelesaikan laporan akhir.

Laporan akhir merupakan progres lebih lanjut dari pelaksanaan kajian Pengembangan Usaha Koperasi dan UMKM di Kulon Progo. Berisi tentang latar belakang, kondisi umum wilayah, metodologi, kendala dan strategi dalam pengembangan UKM serta rekomendasi yang akan ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan.

Dengan diselesaikannya laporan akhir ini, menjadikan tahapan terakhir pelaksanaan Kajian Pengembangan usaha KUMKM Kabupaten Kulon Progo menjadi lebih sempurna dan bermanfaat. Kajian ini diharapkan dapat memberi manfaat semua pihak yang berkepentingan, guidance kajian ini menjadi dasar untuk memberikan rekomendasi bagi pemangku kepentingan di Kabupaten Kulon Progo. Selanjutnya diharapkan ada langkah implementatif sebagai tindak lanjut dari Rekomendasi kajian ini.

Kulon Progo, 28 November 2019

Tim Peneliti



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	3
Daftar Isi	4
BAB I	6
1. 1 Latar Belakang Masalah	6
1. 2 Perumusan Penelitian	13
1. 3 Tujuan Penelitian.....	13
1. 4 Manfaat Penelitian.....	14
BAB II.....	15
TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Definisi Kewirausahaan	15
2.2 Konsep Ekonomi Kerakyatan.....	15
2.3 Sistem Ekonomi Kerakyatan	18
2.4 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.....	20
2.5 UMKM di Indonesia	22
2.6 Konsep Ekonmi Kreatif.....	23
BAB III	28
METODE PENELITIAN.....	28
3.1. Jenis dan Sumber Data	28
3.2. Teknik Pengumpulan Data	28
3.3. Populasi dan Sampel	29
3.4. Teknik Pengolahan Data	30
3.5. Teknis Analisa Data	31
3.6. Mekanisme Pelaksanaan Survei	34
BAB IV	35
DESKRIPSI WILAYAH	35
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Kulon Progo	35



4.1.1	Sejarah Kabupaten Kulon Progo.....	35
4.1.2	Kondisi Geografis Kabupaten Kulon Progo	39
4.1.3	Kependudukan di Kabupaten Kulon Progo	41
4.2	Gambaran Umum Program RPJMD Kabupaten Kulon Progo.....	47
BAB V.....		52
HASIL DAN ANALISIS		52
5.1	Analisis Kondisi UMKM di Kabupaten Kulon Progo	52
5.2	Analisis Kondisi Ekonomi Kreatif di Kabupaten Kulon Progo	554
5.3	Hasil dan Analisis Berdasarkan Metode Penelitian.....	56
5.3.1	Hasil dan Analisis Observasi	56
5.3.2	Hasil dan Analisis Focus Group Discussion (FGD)	62
5.4	Analisis Model Pengembangan UMKM di Kabupaten Kulon Progo	66
BAB VI.....		74
PENUTUP.....		74
6.1	Kesimpulan.....	74
6.1	Rekomendasi	75
DAFTAR PUSTAKA		78



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi daerah dalam era otonomi daerah menghadapi berbagai tantangan. Di satu pihak, kesenjangan ekonomi antar daerah yang berakibat pada rendahnya tingkat pendapatan masyarakat dan bahkan kemiskinan, adalah masalah yang belum terselesaikan. Di lain pihak, upaya pembangunan masih berorientasi sektoral dan kurang memperhatikan karakteristik dan kondisi dari sumber daya suatu wilayah, sedangkan sumber-sumber daya pembangunan semakin terbatas. Tantangan pembangunan ekonomi daerah ke depan adalah mengupayakan pengelolaan jalannya pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan efisien, dengan memanfaatkan seoptimal mungkin potensi wilayah, termasuk sumber daya alam dan sumber daya manusianya, serta mengoptimalkan seluruh sumber-sumber dana untuk membiayai pembangunan ekonomi daerahnya.

Sementara itu, globalisasi mengharuskan daerah-daerah dalam wilayah nasional untuk bersaing dalam perdagangan bebas secara kompetitif dengan produk negara-negara dari seluruh dunia. Pembangunan ekonomi daerah diharapkan mampu menghasilkan produk unggulan bermutu yang dapat bersaing dalam kompetisi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Wilayah provinsi dan kabupaten/kotamadya sebagai wilayah terdepan dari perwilayahan nasional



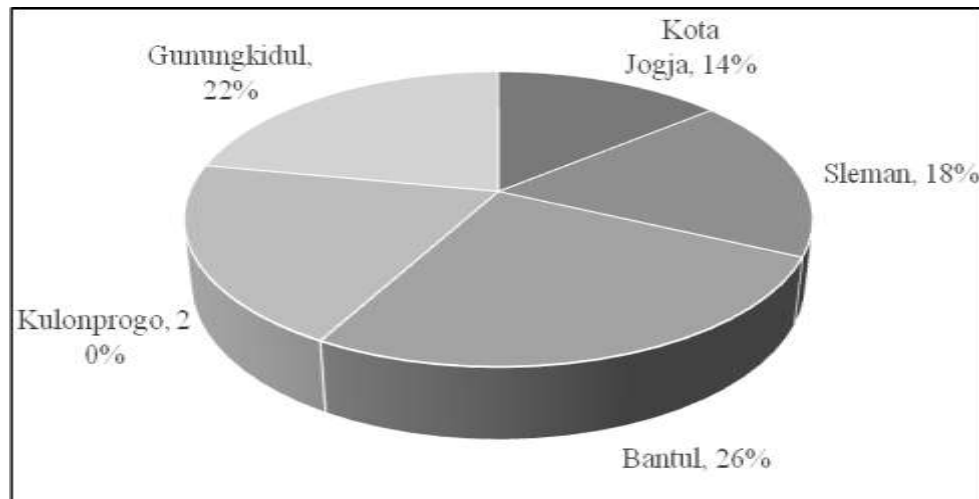
dalam pembangunan ekonomi daerah diharapkan mampu melaksanakan percepatan pembangunan ekonomi daerah secara terfokus pada produk-produk unggulannya agar tidak tertinggal dalam persaingan pasar bebas minimal di wilayah sendiri. Dengan demikian diperlukan berbagai upaya percepatan pengembangan produk daerah berorientasi pasar yang memperhatikan berbagai peluang bisnis dan investasinya, yang secara nyata dapat meningkatkan daya saing produk sekaligus memberikan nilai tambah bagi pengembangan ekonomi daerah.

Indonesia telah memiliki Pancasila sebagai dasar negaranya yang sangat relevan dalam menghadapi permasalahan di atas. Pancasila sebagai dasar Negara merupakan fondasi tangguh dalam inisiasi gerakan perubahan dalam menata sistem ekonomi nasional. Holistiknya unsur-unsur Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kedaulatan & Keadilan dalam tatanan sistem ekonomi nasional sudah semestinya diejawantahkan dengan lebih nyata dan bukan sekadar wacana. Salah satu potensi yang belum digarap adalah aspek geliat ekonomi akar rumput (rooted) yaitu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM merupakan sektor yang tidak rentan dengan berbagai kemunduran ekonomi. UMKM merupakan sektor yang bersifat padat karya termasuk industri-ekonomi kreatif didalamnya. Sektor industri-ekonomi kreatif ini adalah kekuatan penting untuk membangun daya tahan ekonomi bangsa (Yuswohady dan Herdiansyah, 2014).



UMKM memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional, juga UMKM sebagai sumber pertumbuhan ekonomi secara langsung menciptakan peningkatan pendapatan masyarakat, bahtera penyerap lapangan pekerjaan, mengurangi tingkat pengangguran, dan pengentasan kemiskinan. Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UMKM berdasarkan jumlah tenaga kerja, usaha mikro memiliki jumlah tenaga kerja 5-19 orang, sedangkan skala usaha menengah dapat memiliki tenaga kerja 20-99 orang. Dengan demikian UMKM memiliki potensi yang besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan pembangunan ekonomi daerah, apabila dikembangkan dengan baik serta tersedianya pasar bagi produk-produk UMKM maka UMKM akan dapat dikembangkan.

Gambar 1. 1Sebaran UMKM di DIY



Adapun Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu provinsi di Indonesia memiliki sebaran UMKM yang potensial untuk dikembangkan di



berbagai Kabupaten. Data menunjukkan bahwa Kabupaten Kulon Progo memiliki 20% UMKM dibanding seluruh UMKM di DIY. Kabupaten lainnya yaitu Bantul sebanyak 26%, Gunungkidul sebanyak 22%, Sleman sebanyak 18% dan Kota Jogja sebanyak 14%.

Gambar 1. 2UMKM Kabupaten Kulon Progo Berdasarkan Sektor Ekonomi Tahun 2018



Sumber: Dinas Koperasi UKM Kabupaten Kulon Progo (2018)

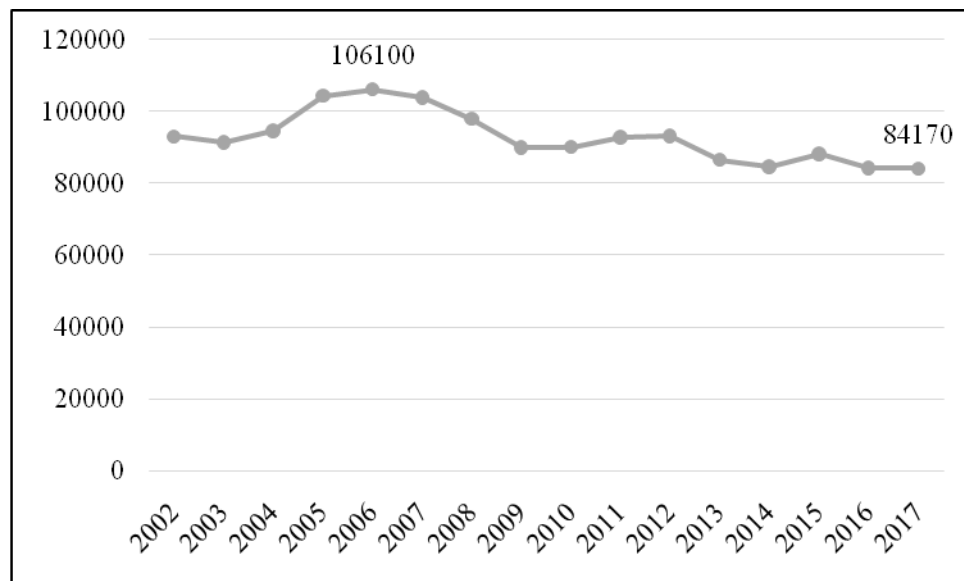
Apabila ditinjau lebih jauh, UMKM di Kabupaten Kulon Progo pada umumnya berasal dari sektor industri pengolahan yaitu sebanyak 18.175 pelaku usaha. Sebanyak 10.445 dari sektor pedagang di luar pasar, sebanyak 7.671 dari sektor pedagang pasar. Sebanyak 1.944 pelaku usaha dari sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan. Sebanyak 467 pelaku usaha dari sektor



hotel dan restoran. Sebanyak 358 pelaku usaha dari sektor bangunan. Sebanyak 354 pelaku usaha dari sektor pengangkutan dan komunikasi, sebanyak 416 pelaku usaha dari sektor jasa. Serta sisanya sebanyak 113 pelaku usaha dari sektor pedaki. Sehingga total UMKM yang ada di Kulon Progo pada tahun 2018 adalah sebanyak 39.943 unit.

UMKM merupakan salah satu unit yang berada di sektor riil, UMKM merupakan sektor yang menjadi harapan besar pemerintah dalam memperbaiki pertumbuhan ekonomi nasional. Karena UMKM ternyata cukup mampu bertahan dalam menghadapi krisis ekonomi (Nugroho dan Rokhaniyah, 2012). Selain itu menurut Hussien (2013), UMKM juga dipandang sebagai salah satu kunci strategi dalam pengentasan kemiskinan.

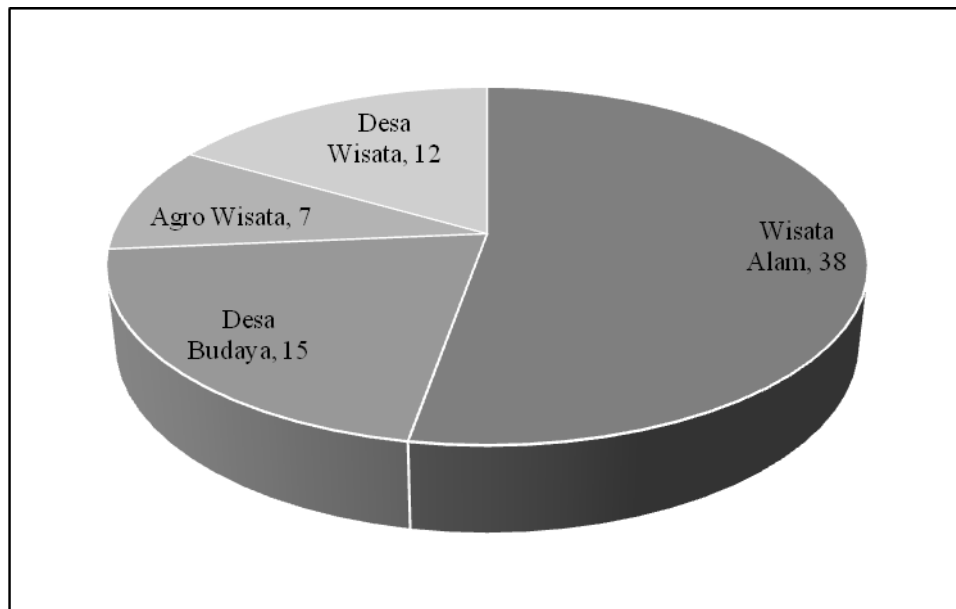
Gambar 1. 3. Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Kulon Progo





Tingkat kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo hingga saat ini mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2017, tercatat terdapat 84.170 penduduk yang tergolong dalam penduduk miskin di Kabupaten Kulon Progo. Salah satu upaya konkrit dan strategis penanggulangan kemiskinan adalah melalui pemberdayaan UMKM yang berbasis pada potensi ekonomi daerah, sehingga program pengentasan kemiskinan lebih bersifat sustainable (Huda dan Bachri, 2009). Dengan adanya pemberdayaan UMKM di daerah maka akan menyerap tenaga kerja di daerah tersebut, meningkatkan multiplier effect, meningkatkan produktivitas, meningkatkan daya beli yang pada akhirnya akan mampu mengentaskan kemiskinan.

Gambar 1. 4. Jumlah Obyek Wisata di Kabupaten Kulon Progo





Laporan Akhir

Kajian Pengembangan Usaha KUMKM Kabupaten Kulon Progo

Pariwisata di Kabupaten Kulon Progo saat ini dirasa cukup mengalami peningkatan. Berdasarkan data yang diperoleh, terdapat 38 wisata alam, 5 desa budaya, 12 desa wisata serta 7 agro wisata di Kabupaten Kulon Progo. Hal tersebut merupakan potensi besar bagi pengembangan UMKM di Kabupaten Kulon Progo. Dengan adanya objek wisata yang senantiasa dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah maka dapat dijadikan peluang besar bagi pelaku UMKM dalam penentuan target pasar, yaitu wisatawan sebagai konsumen. Dengan begitu akan ada transfer dana dari wisatawan berbagai daerah ke Kabupaten Kulon Progo melalui UMKM. Hal tersebut akan meningkatkan kesejahteraan baik secara mikro maupun secara makro bagi Kabupaten Kulon Progo.

Adanya bandara baru di DIY yang berada di Kabupaten Kulon Progo yaitu Yogyakarta International Airport (YIA) seharusnya dapat direspon positif oleh UMKM di Kabupaten Kulon Progo. Harapannya UMKM Kabupaten Kulon Progo dapat memanfaatkan peluang pasar di YIA. Untuk tembus pasar tersebut tentunya diperlukan kelayakan kualitas produk dan akses pasar. Hal tersebut merupakan tantangan dan harapan baru bagi UMKM Kabupaten Kulon Progo.

Potensi sektor ekonomi kreatif di Kabupaten Kulon Progo khususnya produk kriya, kuliner dan fashion merupakan modal yang dapat dikembangkan oleh UMKM. Ekonomi kreatif fokus pada *local content* dan merupakan *backbone* ekonomi masa depan sehingga UMKM Kabupaten Kulon Progo diharapkan dapat merespon potensi dari ekonomi kreatif yang dimiliki.



Perkembangan UMKM di Kabupaten Kulon Progo perlu mendapatkan dorongan agar terus tumbuh dan berkembang. Salah satu bentuk dorongan yang dibutuhkan agar UMKM di Kabupaten Kulon Progo dapat tumbuh berkembang yaitu adanya pemberdayaan yang dilakukan kepada para pelaku UMKM. Dengan adanya pemberdayaan maka diharapkan akan ada peningkatan kualitas SDM, kualitas produk, pemasaran dan lain sebagainya pada UMKM di Kabupaten Kulon Progo. Oleh karena itu, diperlukan sebuah kajian mengenai Strategi Pengembangan Usaha KUMKM melalui Pemberdayaan di Kabupaten Kulon Progo.

1.2 Perumusan Penelitian

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan maka penelitian memiliki rumusan masalah sebagaimana berikut:

1. Bagaimana kondisi UMKM Kabupaten Kulon Progo saat ini?
2. Bagaimana permasalahan yang dihadapi UMKM Kabupaten Kulon Progo?
3. Bagaimana model yang tepat untuk merumuskan strategi pengembangan usaha UMKM?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagaimana berikut:



1. Melakukan peninjauan komprehensif kondisi UMKM Kabupaten Kulon Progo saat ini.
2. Melakukan analisis permasalahan yang dihadapi UMKM Kabupaten Kulon Progo.
3. Merumuskan model strategi pengembangan UMKM Kabupaten Kulon Progo

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan guna dijadikan acuan oleh pihak pemerintah khususnya Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo dan Pemerintah Daerah setempat dalam mencanangkan kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan UMKM di Kabupaten Kulon Progo.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Kewirausahaan

Definisi kewirausahaan mempunyai arti luas dan dinamis jika dilihat dari berbagai aspek atau cara pandangnya. Pembahasan menarik salah satunya menurut Gries dan Naude (2011) yang mendefinisikan kewirausahaan sebagai keadaan disaat individu memanfaatkan kesempatan yang ada dengan menciptakan dan mengembangkan entitas usaha baru. Pada awalnya, mayoritas akademisi hanya memandang kewirausahaan dari fungsinya dalam menciptakan inovasi dan usaha baru saja.

Seiring berkembangnya studi terhadap topik tersebut, kewirausahaan lebih tepat dijabarkan sebagai fenomena sosial yang tidak hanya mengutamakan profit namun juga kesejahteraan secara emosional dan kognitif (*subjective well-being*) (Naude, 2013). Tingkat kesejahteraan (*well-being*) kini telah menjadi salah satu indikator perkembangan ekonomi yang dapat dibandingkan antar negara. *Subjective well-being* mengindikasikan apakah masyarakat puas dengan kehidupan dan pekerjaan yang dimiliki. Kesejahteraan yang tinggi menggambarkan kepuasan yang tinggi terhadap kualitas hidup maupun pekerjaan, yang kemudian menunjukkan bahwa perekonomian bergerak menuju arah yang lebih baik. Sebaliknya, saat masyarakat tidak puas dengan kualitas hidup maupun pekerjaan, berarti terdapat peluang untuk memacu entrepreneurship.

2.2 Konsep Ekonomi Kerakyatan

Muslim (2007) menjelaskan model pembangunan yang berpusat pada manusia menekankan pembangunan bukan sekedar meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan



Laporan Akhir

Kajian Pengembangan Usaha KUMKM Kabupaten Kulon Progo

terpenuhinya kebutuhan masyarakat, tetapi yang terpenting adalah pada upaya meningkatkan kualitas manusia agar dapat meningkatkan partisipasi secara nyata untuk mendorong terciptanya kegiatan produktif yang bernilai tinggi. Pengentasan kemiskinan harus mengubah sikap pasif dan reaktif masyarakat miskin menjadi ikut aktif dalam memberikan kontribusi dalam proses pembangunan. Kurang sabar dan ketakutan mengalami kegagalan program kemiskinan di pihak pelaksana (pemerintah) dalam melibatkan warga miskin secara aktif justru membuat program pengentasan kemiskinan cenderung hanya memenuhi kebutuhan administratif, dan kurang berhasil dalam mengurangi tingkat kemiskinan (Fatony, 2011).

Sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945, Negara Indonesia didirikan dengan tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tanah tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pengejawantahan dari amanat Undang Undang Dasar 1945 tersebut, khususnya yang berkaitan dengan frase “memajukan kesejahteraan umum,” pada hakikatnya merupakan tugas semua elemen bangsa, yakni rakyat di segala lapisan di bawah arahan pemerintah. Tidak terlalu salah jika, mengacu pada definisi tujuan pendirian negara yang mulia tersebut, kesejahteraan dan kemakmuran bangsa Indonesia harus dicapai dengan menerapkan prinsip “dari, oleh, dan untuk rakyat.”

Konsep tersebut telah jauh-jauh hari dipikirkan oleh Bung Hatta (wakil presiden pertama Negara Kesatuan Republik Indonesia). Beliau, bahkan jauh sebelum Schumacher (yang terkenal dengan bukunya *Small is Beautiful*, dan Amartya Sen) pemenang Nobel 1998 Bidang Ekonomi, berpendapat bahwa ekonomi kerakyatan merupakan bentuk perekonomian yang paling tepat bagi bangsa Indonesia (Nugroho, 1997). Orientasi utama dari ekonomi



Laporan Akhir

Kajian Pengembangan Usaha KUMKM Kabupaten Kulon Progo

kerakyatan adalah rakyat banyak, bukan sebagian atau sekelompok kecil orang. Pandangan tersebut lahir, menurut Baswir (2006), jauh sebelum Indonesia merdeka. Bung Hatta melalui artikelnya yang berjudul “Ekonomi Rakyat” yang diterbitkan dalam harian Daulat Rakyat (20 November 1933), mengekspresikan kegundahannya melihat kondisi ekonomi rakyat Indonesia di bawah penindasan pemerintah Hindia Belanda. Dapat dikatakan bahwa “kegundahan” hati Bung Hatta atas kondisi ekonomi rakyat Indonesia yang waktu itu masih berada di bawah penjajahan Belanda, merupakan cikal bakal dari lahirnya, katakanlah demikian, konsep ekonomi kerakyatan.

Ada beberapa definisi dari Sistem Ekonomi Kerakyatan antara lain menurut Konvensi ILO169 tahun 1989 adalah ekonomi kerakyatan adalah ekonomi tradisional yang menjadi basis kehidupan masyarakat lokal dalam mempertahankan kehidupannya. Ekonomi kerakyatan ini dikembangkan berdasarkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat lokal dalam mengelola lingkungan dan tanah mereka secara turun temurun. Aktivitas ekonomi kerakyatan ini terkait dengan ekonomi subsisten antara lain pertanian tradisional seperti perburuan, perkebunan, mencari ikan, dan lainnya kegiatan disekitar lingkungan alamnya serta kerajinan tangan dan industri rumahan. Kesemua kegiatan ekonomi tersebut dilakukan dengan pasar tradisional dan berbasis masyarakat, artinya hanya ditujukan untuk menghidupi dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya sendiri. Kegiatan ekonomi dikembangkan untuk membantu dirinya sendiri dan masyarakatnya, sehingga tidak mengeksploitasi sumber daya alam yang ada.

Dengan demikian ekonomi kerakyatan (ekonomi pemerataan) adalah bagian besar dari cara-cara bergumul dan bertahan untuk menjaga kelangsungan kehidupannya: dipertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, perkebunan, dalam industri-industri kecil dan



kerajinan serta dalam perdagangan atau kegiatan “swadaya” lainnya, baik di daerah pedesaan maupun daerah perkotaan. Ekonomi rakyat berciri subsisten dengan modal utama tenaga kerja keluarga dan modal serta teknologi seadanya (Mubyarto,1998: 46).

2.3 Sistem Ekonomi Kerakyatan

Adapun Menurut Dumairy (1996) sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Dumairy menjelaskan bahwa suatu sistem ekonomi tidaklah berdiri sendiri, karena berkaitan dengan falsafah, pandangan dan pola hidup masyarakat tempatnya berpijak. Sistem ekonomi sesungguhnya merupakan salah satu unsur saja dalam suatu sepersistem kehidupan masyarakat. Syarat mutlak berjalannya sistem ekonomi kerakyatan yang berkeadilan sosial adalah berdaulat di bidang politik, mandiri di bidang ekonomi, berkepribadian di bidang budaya.

Yang mendasari paradigma pembangunan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan sosial, yaitu penyegaran nasionalisme ekonomi melawan segala bentuk ketidakadilan sistem dan kebijakan ekonomi, pendekatan pembangunan berkelanjutan yang multidisipliner dan multicultural, dan pengkajian ulang pendidikan dan pengajaran ilmu-ilmu ekonomi dan sosial di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa definisi dari sistem ekonomi kerakyatan adalah Sistem Ekonomi Nasional Indonesia yang berasaskan pada kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat.



Laporan Akhir

Kajian Pengembangan Usaha KUMKM Kabupaten Kulon Progo

Sistem Ekonomi Kerakyatan memiliki beberapa ciri-ciri. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut:

- a. Yang menguasai hajat hidup orang banyak adalah negara/pemerintah. Contoh hajat hidup orang banyak yakni seperti air, bahan bakar minyak/BBM, pertambangan/hasil bumi, dan lain sebagainya.
- b. Peran negara adalah penting namun tidak dominan, dan begitu juga dengan peranan pihak swasta yang posisinya penting namun tidak mendominasi. Sehingga tidak terjadi kondisi sistem ekonomi liberal maupun sistem ekonomi komando. Kedua pihak yakni pemerintah dan swasta hidup beriringan, berdampingan secara damai dan saling mendukung.
- c. Masyarakat adalah bagian yang penting di mana kegiatan produksi dilakukan oleh semua untuk semua serta dipimpin dan diawasi oleh anggota masyarakat.
- d. Modal atau pun buruh tidak mendominasi perekonomian karena didasari atas asas kekeluargaan antar sesama manusia.

Sedangkan tujuan dari sistem ekonomi kerakyatan antara lain yaitu membangun Indonesia yang berdikari secara ekonomi, berdaulat secara politik, dan berkepribadian yang berkebudayaan, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, mendorong pemerataan pendapatan rakyat, dan meningkatkan efisiensi perekonomian secara nasional.

Kemudian lima hal pokok yang harus segera diperjuangkan agar sistem ekonomi kerakyatan tidak hanya menjadi wacana saja, antara lain peningkatan disiplin pengeluaran anggaran dengan tujuan utama memerangi praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam segala bentuknya, penghapusan monopoli melalui penyelenggaraan mekanisme persaingan yang berkeadilan (*fair competition*), peningkatan alokasi sumber-sumber penerimaan negara kepada pemerintah daerah, penguasaan dan redistribusi pemilikan lahan



pertanian kepada petani penggarap, dan pembaharuan UU Koperasi dan pendirian koperasi-koperasi “ sejati” dalam berbagai badan usaha dan kegiatan. Yang perlu dicermati, peningkatan kesejahteraan rakyat dalam konteks ekonomi kerakyatan tidak didasarkan pada paradigma lokomotif, melainkan pada paradigma fondasi.

2.4 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki definisi yang berbeda pada setiap literatur menurut beberapa instansi atau lembaga bahkan undang-undang. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM didefinisikan sebagai berikut:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, ataupun menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah



Laporan Akhir

Kajian Pengembangan Usaha KUMKM Kabupaten Kulon Progo

kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan kekayaan dan hasil penjualan, menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 pasal 6, kriteria usaha mikro yaitu:

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Sedangkan kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Di Negara lain atau tingkat dunia, terdapat berbagai definisi yang berbeda mengenai UKM yang sesuai menurut karakteristik masing – masing Negara, yaitu sebagai berikut



Laporan Akhir

Kajian Pengembangan Usaha KUMKM Kabupaten Kulon Progo

1. World Bank: UKM adalah usaha dengan jumlah tenaga kerja \pm 30 orang, pendapatan per tahun US\$ 3 juta dan jumlah aset tidak melebihi US\$ 3 juta.
2. Di Amerika: UKM adalah industri yang tidak dominan di sektornya dan mempunyai pekerja kurang dari 500 orang.
3. Di Eropa: UKM adalah usaha dengan jumlah tenaga kerja 10-40 orang dan pendapatan per tahun 1-2 juta Euro, atau jika kurang dari 10 orang, dikategorikan usaha rumah tangga.
4. Di Jepang: UKM adalah industri yang bergerak di bidang manufakturing dan retail/service dengan jumlah tenaga kerja 54-300 orang dan modal ¥ 50 juta-300 juta.
5. Di Korea Selatan: UKM adalah usaha dengan jumlah tenaga kerja \leq 300 orang dan aset \leq US\$ 60 juta.
6. Di beberapa Asia Tenggara: UKM adalah usaha dengan jumlah tenaga kerja 10-15 orang (Thailand), atau 5-10 orang (Malaysia), atau 10-99 orang (Singapura), dengan modal \pm US\$ 6 juta.

2.5 UMKM di Indonesia

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional, terutama dalam kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Mengingat pentingnya peranan UMKM dibidang ekonomi, sosial dan politik, maka saat ini perkembangan UMKM diberi perhatian cukup besar diberbagai belahan dunia.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mempunyai peranan yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil



pembangunan. UMKM diharapkan mampu memanfaatkan sumber daya nasional, termasuk pemanfaatan tenaga kerja yang sesuai dengan kepentingan rakyat dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang maksimum. Rahmana (2009) menambahkan UMKM telah menunjukkan peranannya dalam penciptaan kesempatan kerja dan sebagai salah satu sumber penting bagi pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Usaha kecil juga memberikan kontribusi yang tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia di sektor-sektor industri, perdagangan dan transportasi. Sektor ini mempunyai peranan cukup penting dalam penghasilan devisa negara melalui usaha pakaian jadi (garment), barang-barang kerajinan termasuk meubel dan pelayanan bagi turis.

Peranan dalam bidang sosial bahwa UMKM disini mampu memberikan manfaat sosial yaitu mereduksi ketimpangan pendapatan, terutama di negara-negara berkembang. Peranan usaha kecil tidak hanya menyediakan barang-barang dan jasa bagi konsumen yang berdaya beli rendah, tetapi juga bagi konsumen perkotaan lain yang berdaya beli lebih tinggi. Selain itu, usaha kecil juga menyediakan bahan baku atau jasa bagi usaha menengah dan besar, termasuk pemerintah lokal. Tujuan sosial dari UMKM adalah untuk mencapai tingkat kesejahteraan minimum, yaitu menjamin kebutuhan dasar rakyat.

2.6 Konsep Ekonomi Kreatif

Dunia mengalami perubahan cepat dari aspek sosial dan teknologi yang menyebabkan penipisan sekat-sekat negara, artinya tercipta proses saling mempengaruhi dan ketergantungan satu dengan lainnya. Teknologi digital merupakan percepatan kemajuan teknologi yang saat ini sangat berpengaruh pada perubahan tata kehidupan di dunia. Perang dagang antar negara sangat tipis perbedaannya dengan kolaborasi antar negara. Pada suatu



Laporan Akhir

Kajian Pengembangan Usaha KUMKM Kabupaten Kulon Progo

saat, terdapat persaingan antar Negara, namun pada saat lain terjadi kolaborasi antar Negara. Hal ini juga terjadi pada ekosistem bisnis di dunia pada setiap kelas usaha.

Ekonomi kreatif berbasis pada hasrat berkreasi melalui komunikasi budaya seperti seni, desain, fashion, dan wujud budaya lainnya. Pada ini terdapat bakat-bakat untuk membuat sesuatu melalui imajinasi-imajinasi kreatif. Pasar dunia saat ini siap untuk membelanjakan uangnya pada hal-hal tersebut (John Newbiggin, 2010). Tradisi yang lahir dari budaya dan industri budaya jika dikreasikan, didesain, serta dirangkai menjadi aktivitas kreatif, maka nilai ekonomi akan tumbuh dalam era ini. Aktivitas ini akan mengalami percepatan jika ditopang dengan pemanfaatan teknologi digital yang memadai.

Ekspresi kultural yang dapat memenuhi kebutuhan saat ini (kontemporer) memiliki daya saing yang cukup kuat dalam konstelasi pasar. Ekonomi global memaksa semua pelaku usaha untuk lebih mampu berkompetisi dan produktif. Negara yang tidak memiliki kemampuan tersebut pasti akan tertinggal jauh dengan Negara lainnya. Jika masyarakat dalam suatu Negara mengalami kemandegan dalam berinovasi dapat diprediksi akan mengeksploitasi sumber daya alam secara sporadis. John Howkin menulis dalam buku yang berjudul *Creative Economy*, bahwa manusia yang memiliki banyak ide akan lebih berdaya dibandingkan dengan manusia yang bekerja untuk mesin. Kreativitas akan melampaui batas-batas yang selama ini melingkupi kehidupan manusia. Kemampuan untuk merealisasikan berpikir kreatif dalam realita kehidupan disebut kemampuan inovatif.

Indonesia telah memulai pengembangan ekonomi kreatif sejak sepuluh tahun terakhir. Pada tahun 2007 mulai dibuat roadmap pengembangan industri kreatif sebagai wujud dari kegiatan ekonomi kreatif. Industri kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan



Laporan Akhir

Kajian Pengembangan Usaha KUMKM Kabupaten Kulon Progo

kesejahteraan serta lapangan kerja dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu (Kementerian Perdagangan RI, 2007). Dengan kata lain, ekonomi kreatif berfokus pada penciptaan barang dan jasa dengan mengandalkan keahlian, bakat dan kreativitas sebagai kekayaan intelektual. SDM merupakan aset terpenting dalam pengembangan ekonomi kreatif.

Penumbuhan ekonomi kreatif berbasis pada kebijakan-kebijakan yang dapat mendukung terciptanya kondisi masyarakat yang dapat mengembangkan kreativitasnya. Ekonomi kreatif pada dasarnya adalah ekonomi yang mengedepankan ide sebagai basis bisnis. Perlindungan terhadap kekayaan intelektual sangat strategis perannya dalam menjaga pertumbuhan ekonomi kreatif. Ruh dari kekayaan intelektual adalah apresiasi atas ide-ide yang memiliki nilai ekonomi. Kekayaan intelektual dapat menjadi asset yang berharga bagi pelaku-pelaku usaha ekonomi kreatif.

Masyarakat Indonesia memiliki kekayaan budaya yang sangat besar, namun masih belum termanfaatkan secara optimal. Kekayaan budaya ini sudah diakui eksistensinya oleh negara-negara di seluruh dunia. Kekayaan alamnya juga demikian, wilayah yang berada di khatulistiwa dan diapit oleh dua benua dan samudra menjadikan Indonesia memiliki bentang alam yang kaya dan indah. Semua sumber daya tersebut merupakan aset berharga untuk menghadapi tantangan masa depan.

Jika dilihat dari sudut pandang ekonomi kreatif, Kabupaten Kulon Progo juga memiliki potensi sangat besar. Sumber daya alam dan budaya masyarakat setempat cukup potensial jika digerakkan menjadi kekuatan ekonomi masa depan. Tantangan paling besar adalah peningkatan kapasitas SDM dan penguatan peran pemerintah dalam menggerakkan roda perekonomian yang berbasis pada kreativitas.



Laporan Akhir

Kajian Pengembangan Usaha KUMKM Kabupaten Kulon Progo

Penumbuhan ekonomi kreatif di daerah perlu dikaji secara serius karakter lokalnya, karena ekonomi kreatif sangat tergantung dari partisipasi masyarakatnya. Beberapa aktor yang terlibat dalam pengembangan ekonomi kreatif terdiri dari pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media. Kolaborasi para aktor ini sering disebut dengan istilah pentahelix, atau lima komponen yang saling berintegrasi untuk membentuk kolaborasi pengembangan ekonomi kreatif. Kabupaten Kulon Progo perlu memetakan aktor-aktor tersebut untuk diajak berkolaborasi mengembangkan ekonomi kreatif di daerah.

Rantai nilai yang dikembangkan dalam ekonomi kreatif terdiri dari:

1. Kreasi

Tahapan ini merupakan tahapan awal dari proses penumbuhan ekonomi kreatif. Kreasi akan tumbuh dengan baik jika terdapat ruang-ruang yang memungkinkan untuk mengekspresikannya. Ruang-ruang tersebut dapat disebut dengan istilah ruang kreasi yang diharapkan dapat memicu munculnya ide-ide kreatif masyarakat. Ruang kreasi dapat dilengkapi dengan sarana-sarana kreasi untuk memfasilitasi komunitas-komunitas kreatif.

2. Produksi

Produksi adalah proses mewujudkan ide-ide kreatif menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi. Ide-ide kreatif sering memerlukan sarana-sarana produksi kreatif yang mungkin berbeda dengan sarana produksi untuk pelaku usaha lainnya. Keterampilan SDM yang cukup dapat mendukung proses produksi dengan baik. Dua aspek yang harus dipertimbangkan pada proses produksi adalah kualitas produk dan kapasitas produksi. Tentunya efisiensi juga diperlukan untuk menekan biaya produksi yang



ujungnya akan berpengaruh pada harga jual produk.

3. Distribusi

Distribusi adalah tahapan penyaluran ke simpul-simpul pasar. Pada tahapan ini perlu memahami struktur dan perilaku pasar. Penetrasi pasar akan menentukan strategi aksesnya. Saat ini distribusi pasar ekonomi kreatif secara bertahap mulai bergeser menggunakan teknologi digital. Ini menyebabkan pelaku usaha ekonomi kreatif didominasi oleh anak-anak muda. Produk-produk mereka mulai bisa menggeser produk dari *brand-brand* besar yang sudah lama menguasai pasar.

4. Konsumsi

Konsumsi memiliki arti bagaimana cara orang menggunakan produk-produk kreatif. Ini mempunyai konsekuensi pada pemahaman terhadap gaya hidup dan kebutuhan hidup konsumen. Pola konsumsi merupakan data yang mutlak digunakan oleh pelaku usaha kreatif. Sistematisasi bisnis pelaku usaha kreatif hampir selalu diawali dengan pemahaman terhadap perilaku konsumsi masyarakat. Beberapa aplikasi digital sudah menyediakan data yang diperlukan untuk melihat perilaku konsumsi masyarakat.

5. Konservasi

Konservasi memiliki arti bagaimana cara memelihara agar usaha kreatif tetap berkelanjutan. Pelaku usaha selalu melihat ke depan (*foreward*), dengan cara selalu melakukan inovasi dan perluasan pasar. Di samping itu pelaku usaha kreatif juga melihat tumbuhnya ide-ide kreasi dan produksi yang dapat terus terjaga untuk memenuhi kebutuhan pasar.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Sumber data primer adalah sumber yang asli dan dikumpulkan secara khusus untuk menjawab pertanyaan penelitian yang bersangkutan (Sugiama, 2008). Sedangkan menurut Suhartanto (2014) sumber data primer adalah data yang dikumpulkan oleh seseorang (periset) untuk memecahkan masalah yang sedang diinvestigasi. Dalam penelitian ini data primer didapatkan dengan melakukan metode survei. Survei adalah suatu teknik riset dimana sample diwawancarai dalam beberapa bentuk atau perilaku reponden yang diobservasi dan dijelaskan dalam beberapa cara (Babin, 2010). Sedangkan menurut Maholtra (2004) survei merupakan suatu metode pengumpulan data dari suatu populasi atau sample dengan menggunakan kuesioner dengan bentuk pertanyaan yang terstruktur.

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan untuk memperoleh data dalam kajian ini dilakukan dengan beberapa teknik, yaitu:

1. *Desk study*, meliputi studi literatur, dan kajian sejenis terdahulu, serta regulasi dan kebijakan terkait dengan UMKM



2. **Observasi**, melalui pengamatan langsung di lapangan terhadap para pelaku UMKM di Kabupaten Kulon Progo.
3. **Wawancara**, adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung yang dikerjakan secara sistemik dan berdasarkan tujuan penelitian ini. Wawancara akan dilakukan terhadap para pelaku UMKM, regulator UMKM serta stakeholder lainnya yang berkicimpung dalam pengembangan UMKM.
4. **Focus Group Discussion (FGD)**, yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengundang stakeholder yang terkait dalam pengembangan UMKM untuk melakukan diskusi dengan satu topik tertentu sehingga menghasilkan suatu kesimpulan atau rekomendasi.
5. **Kuesioner**, yaitu pengumpulan data melalui penyebaran daftar pertanyaan sesuai dengan topik studi kepada para responden.

3.3. Populasi dan Sampel

Menurut Suharyadi & Purwonto (2009), populasi merupakan kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, benda-benda, dan ukuran lain yang menjadi objek perhatian atau kumpulan seluruh objek yang menjadi perhatian. Adapun menurut Sugiyono (2016), populasi merupakan daerah generalisasi yang berupa obyek/subyek yang memiliki kualitas serta karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun sampel merupakan suatu bagian dari populasi tertentu yang menjadi perhatian



(Suharyadi & Purwonto, 2009). Sedangkan Sugiyono (2016) berpendapat bahwa sampel merupakan bagian dari jumlah serta karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.

Baik tidaknya penentuan sampel akan berpengaruh terhadap validitas penelitian. Untuk mendapatkan sampel yang baik dan representatif, digunakan teknik sampling (Udiyono, 2007). Tiap anggota populasi yaitu seluruh masyarakat yang terlibat langsung maupun tidak langsung terhadap penjualan produk UMKM memiliki kesempatan yang sama untuk diambil sebagai sampel. Oleh sebab itu, pengambilan sampel dilakukan secara acak atau *random*. Dan teknik sampling yang digunakan adalah *purposive random sampling*. *Purposive random sampling* merupakan tehnik pengambilan sampel dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang dibuat oleh peneliti (Hadi, 2004). Kriteria inklusi merupakan kriteria dimana subjek penelitian dapat mewakili dalam sampel penelitian yang mempunyai syarat menjadi sampel (Hidayat, 2007). Kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah:

- a. Masyarakat bersedia menjadi responden.
- b. Masyarakat yang terlibat langsung terhadap UMKM

3.4. Teknik Pengolahan Data

- a. Mengedit (*editing*)

Editing dimaksudkan untuk meneliti tiap daftar pertanyaan yang diisi agar lengkap. *Editing* dilakukan di lapangan, sehingga jika terjadi kesalahan atau



kekurangan data dapat diperbaiki. *Editing* juga pemeriksaan jawaban dalam daftar isian kuesioner sehingga jawaban yang salah atau meragukan dan kurang lengkap dapat diperbaiki.

b. Pengkodean (*coding*)

Setelah *data* terkumpul dan selesai diedit di lapangan, tahap berikutnya adalah mengkode data, yaitu melakukan pemberian kode untuk setiap pertanyaan untuk memudahkan dalam pengolahan data.

c. Tabulasi (*tabulating*)

Tabulasi dilakukan dengan menggunakan *Ms.Excel* yaitu memasukkan data ke dalam tabel yang tersedia, sehingga sifat data akan tampak.

3.4. Teknik Analisa Data

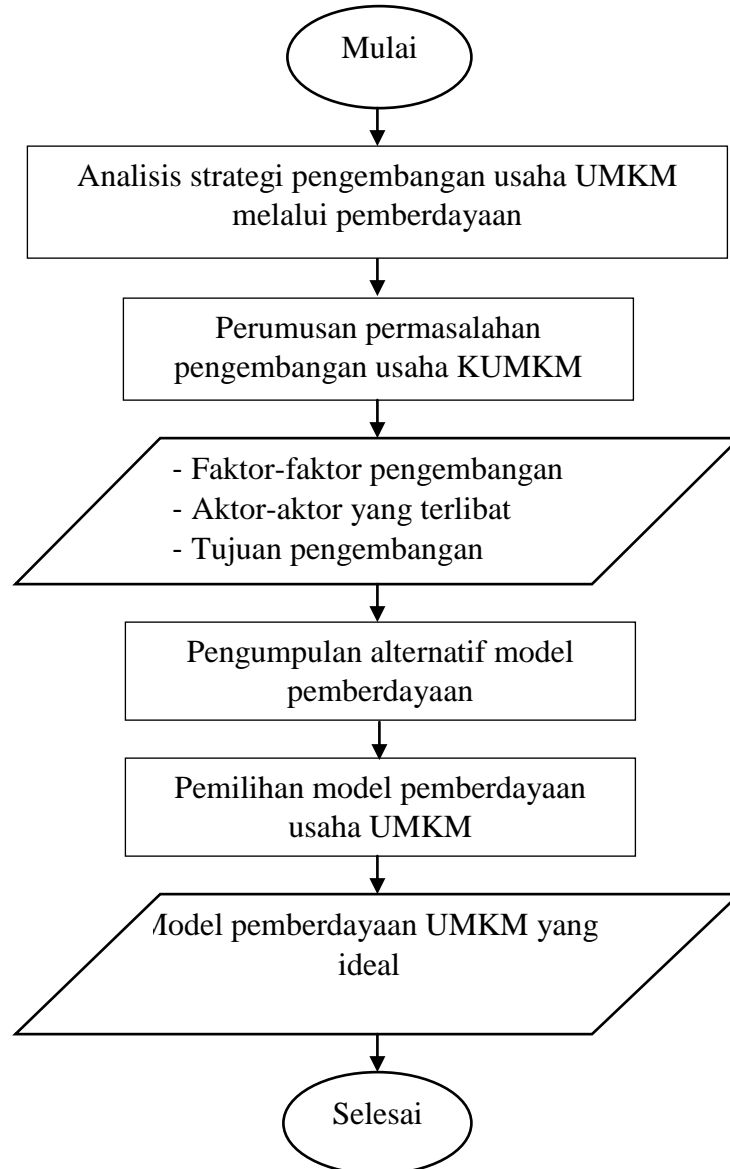
Tahap ini dimaksudkan untuk menganalisis temuan-temuan baik dari *review* hasil studi, kompilasi data hasil survey lapangan, dan data dari sumber-sumber lain yang terkait. Tahap analisis ini diharapkan akan menjadi jembatan bagi penyusunan strategi dan rekomendasi yang berhubungan dengan arahan kebijakan dan strategi pengembangan UMKM. Sasaran dalam tahap ini adalah analisis pada aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Peta pelaku usaha (KUMKM) yang berada di Kabupaten Kulon Progo
- b. Rumusan komprehensif kondisi pemberdayaan pelaku usaha (KUMKM) yang dilakukan oleh pemerintah
- c. Model strategi pengembangan usaha KUMKM melalui program pemberdayaan.



Penelitian mengenai pengembangan usaha KUMKM Kabupaten Kulon Progo akan dianalisis menggunakan teknis sebagaimana berikut:

Gambar 3. 1 Tahapan Analisa Data



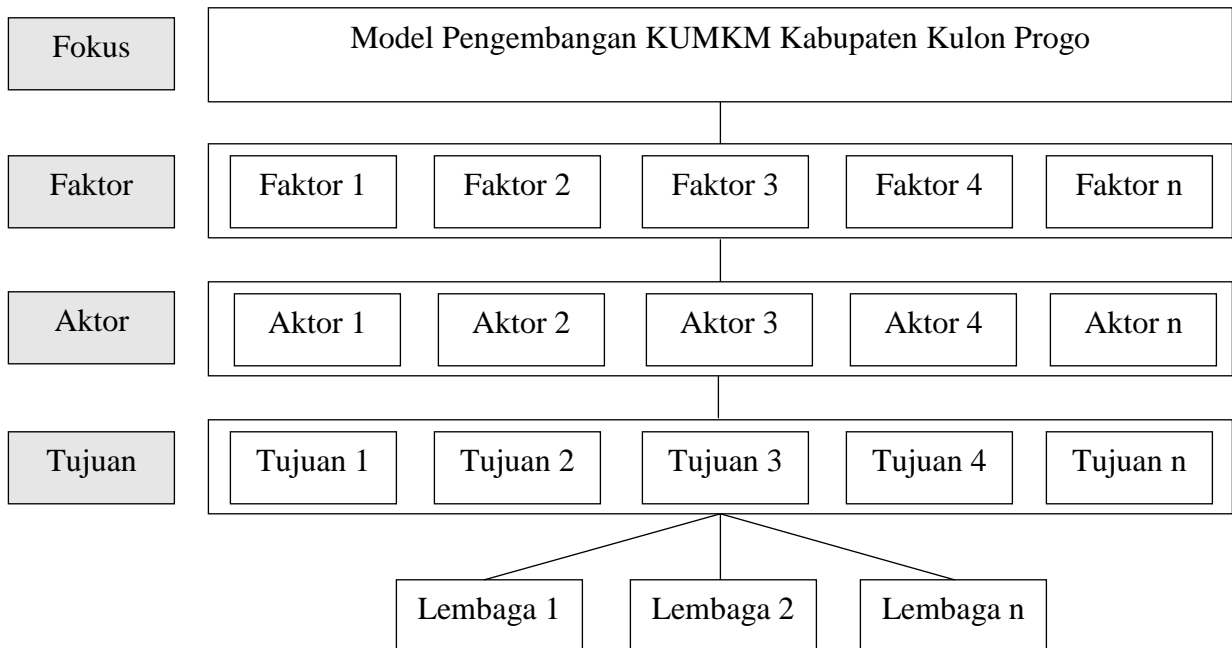
Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif melalui studi kasus dengan pendekatan sistem. Metode pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis faktor, aktor, dan tujuan sehingga diperoleh model pemberdayaan usaha UMKM



melalui program pemberdayaan di Kabupaten Kulon Progo. Prosedur penentuan strategi mengikuti kaidah dengan tahapan sebagai berikut (Zulfiandri & Marimin, 2012):

1. Pengidentifikasian sistem melalui pendefinisian masalah, pembatasan ruang lingkup kajian dan pengumpulan sejumlah informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan UMKM dan program pemberdayaan.
2. Penyusunan hierarki yang diawali dengan tujuan umum, dilanjutkan dengan kriteria-kriteria dan alternatif-alternatif pilihan yang ingin dirangkingkan sebagaimana Gambar 3.2

Gambar 3. 2 Model Pengembangan Usaha KUMKM di Kabupaten Kulon Progo





3.2. Mekanisme Pelaksanaan Survei

Pelaksanaan survei terlebih dahulu dilakukan rapat koordinasi rangka pemantapan tim surveyor dan penyamaan persepsi data (sekunder dan primer), dan tata acara pengisian kuesioner yang telah disusun oleh tim ahli. Setelah itu, tim survei melakukan pengumpulan data (sekunder dan primer). Pengumpulan data primer, khususnya pencarian informasi UMKM dengan metode Observasi, Wawancara Terbuka dan Kuesioner. Selanjutnya Tim Survei melakukan survei lapangan ke masing-masing usaha daerah yang dijadikan sampel kegiatan tersebut, melalui kuesioner; wawancara terbuka dan tertutup. Hasil survei yang dilakukan oleh surveyor kemudian akan diverifikasi oleh Koordinator Survei dan Tenaga Ahli, jika hasil survei tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka akan dikembalikan ke Surveyor yang bersangkutan untuk dilakukan survei kembali.



BAB IV

DESKRIPSI WILAYAH

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Kulon Progo

4.1.1 Sejarah Kabupaten Kulon Progo

Sebelum terbentuknya Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 15 Oktober 1951, wilayah Kulon Progo terbagi atas dua kabupaten yaitu Kabupaten Kulon Progo yang merupakan wilayah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kabupaten Adikarta yang merupakan wilayah Kadipaten Pakualaman.

Sebelum Perang Diponegoro di daerah Negaragung, termasuk di dalamnya wilayah Kulon Progo, belum ada pejabat pemerintahan yang menjabat di daerah sebagai penguasa. Pada waktu itu roda pemerintahan dijalankan oleh pepatih dalem yang berkedudukan di Ngayogyakarta Hadiningrat. Setelah Perang Diponegoro 1825-1830 di wilayah Kulon Progo sekarang yang masuk wilayah Kasultanan terbentuk empat kabupaten yaitu:

1. Kabupaten Pengasih, tahun 1831
2. Kabupaten Sentolo, tahun 1831
3. Kabupaten Nanggulan, tahun 1851
4. Kabupaten Kalibawang, tahun 1855

Masing-masing kabupaten tersebut dipimpin oleh para Tumenggung. Menurut buku 'Prodjo Kejawen' pada tahun 1912 Kabupaten Pengasih,



Laporan Akhir

Kajian Pengembangan Usaha KUMKM Kabupaten Kulon Progo

Sentolo, Nanggulan dan Kalibawang digabung menjadi satu dan diberi nama Kabupaten Kulon Progo, dengan ibukota di Pengasih. Bupati pertama dijabat oleh Raden Tumenggung Poerbowinoto. Dalam perjalanannya, sejak 16 Februari 1927 Kabupaten Kulon Progo dibagi atas dua Kawedanan dengan delapan Kapanewon, sedangkan ibukotanya dipindahkan ke Sentolo. Dua Kawedanan tersebut adalah Kawedanan Pengasih yang meliputi kapanewon Lendah, Sentolo, Pengasih dan Kokap/sermo. Kawedanan Nanggulan meliputi kapanewon Watumurah/Girimulyo, Kalibawang dan Samigaluh. Yang menjabat bupati di Kabupaten Kulon Progo sampai dengan tahun 1951 adalah sebagai berikut:

1. RT. Poerbowinoto
2. KRT. Notoprajarto
3. KRT. Harjodiningrat
4. KRT. Djojodiningrat
5. KRT. Pringgodiningrat
6. KRT. Setjodiningrat
7. KRT. Poerwoningrat

Di daerah selatan Kulon Progo ada suatu wilayah yang masuk Keprajan Kejawen yang bernama Karang Kemuning yang selanjutnya dikenal dengan nama Kabupaten Adikarta. Menurut buku 'Vorstenlanden' disebutkan bahwa pada tahun 1813 Pangeran Notokusumo diangkat menjadi KGPA Ario Paku Alam I dan mendapat palungguh di sebelah barat Sungai Progo



sepanjang pantai selatan yang dikenal dengan nama Pasir Urut Sewu. Oleh karena tanah pelungguh itu letaknya berpencaran, maka sentono ndalem Paku Alam yang bernama Kyai Kawirejo I menasehatkan agar tanah pelungguh tersebut disatukan letaknya. Dengan disatukannya pelungguh tersebut, maka menjadi satu daerah kesatuan yang setingkat kabupaten. Daerah ini kemudian diberi nama Kabupaten Karang Kemuning dengan ibukota Brosot.

Sebagai Bupati yang pertama adalah Tumenggung Sosrodigdoyo. Bupati kedua, R. Rio Wasadirdjo, mendapat perintah dari KGPAA Paku Alam V agar mengusahakan pengeringan Rawa di Karang Kemuning. Rawa-rawa yang dikeringkan itu kemudian dijadikan tanah persawahan yang Adi (Linuwih) dan Karta (Subur) atau daerah yang sangat subur. Oleh karena itu, maka Sri Paduka Paku Alam V lalu berkenan menggantikan nama Karang Kemuning menjadi Adikarta pada tahun 1877 yang beribukota di Bendungan. Kemudian pada tahun 1903 bukotanya dipindahkan ke Wates. Kabupaten Adikarta terdiri dua kawedanan (distrik) yaitu kawedanan Sogan dan kawedanan Galur. Kawedanan Sogan meliputi kapanewon (onder distrik) Wates dan Temon, sedangkan Kawedanan Galur meliputi kapanewon Brosot dan Panjatan.

Bupati di Kabupaten Adikarta sampai dengan tahun 1951 berturut-turut sebagai berikut:

1. Tumenggung Sosrodigdoyo
2. R. Rio Wasadirdjo
3. RT. Surotani



4. RMT. Djayengirawan
5. RMT. Notosubroto
6. KRMT. Suryaningrat
7. Mr. KRT. Brotodiningrat
8. KRT. Suryaningrat (Sungkono)

Pada 5 September 1945 Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Pakualam VIII mengeluarkan amanat yang menyatakan bahwa daerah beliau yaitu Kasultanan dan Pakualaman adalah daerah yang bersifat kerajaan dan daerah istimewa dari Negara Republik Indonesia. Pada tahun 1951, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Pakualam VIII memikirkan perlunya penggabungan antara wilayah Kasultanan yaitu Kabupaten Kulon Progo dengan wilayah Pakualaman yaitu Kabupaten Adikarto. Atas dasar kesepakatan dari Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Pakualam VIII, maka oleh pemerintah pusat dikeluarkan UU No. 18 tahun 1951 yang ditetapkan tanggal 12 Oktober 1951 dan diundangkan tanggal 15 Oktober 1951. Undang-undang ini mengatur tentang perubahan UU No. 15 tahun 1950 untuk penggabungan Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Adikarto dalam lingkungan DIY menjadi satu kabupaten dengan nama Kulon Progo yang selanjutnya berhak mengatur dan mengurus rumah-tanganya sendiri. Undang-undang tersebut mulai berlaku mulai tanggal 15 Oktober 1951. Secara yuridis formal Hari Jadi Kabupaten Kulon Progo adalah 15 Oktober 1951, yaitu saat diundangkannya UU No. 18 tahun 1951 oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia.



Selanjutnya pada tanggal 29 Desember 1951 proses administrasi penggabungan telah selesai dan pada tanggal 1 Januari 1952, administrasi pemerintahan baru, mulai dilaksanakan dengan pusat pemerintahan di Wates.

4.1.2 Kondisi Geografis Kabupaten Kulon Progo

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kulon Progo yang terdiri dari 12 Kecamatan yaitu Galur, Girimulyo, Kalibawang, Kokap, Lendah, Nanggulan, Panjatan, Pengasih, Samigaluh, Sentolo, Temon dan Wates. Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu kabupaten dari lima kabupaten/kota di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di bagian barat. Batas Kabupaten Kulon Progo di sebelah timur yaitu Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman, di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Purworejo, Propinsi Jawa Tengah, di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah dan di sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia.

Kabupaten Kulon Progo memiliki topografi yang bervariasi dengan ketinggian antara 0 - 1000 meter di atas permukaan air laut, yang terbagi menjadi 3 wilayah meliputi:

a. **Bagian Utara**

Merupakan dataran tinggi/perbukitan Menoreh dengan ketinggian antara 500 1000 meter di atas permukaan air laut, meliputi Kecamatan Girimulyo, Kokap, Kalibawang dan Samigaluh. Wilayah ini penggunaan



Laporan Akhir

Kajian Pengembangan Usaha KUMKM Kabupaten Kulon Progo

tanah diperuntukkan sebagai kawasan budidaya konservasi dan merupakan kawasan rawan bencana tanah longsor.

b. Bagian Tengah

Merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian antara 100 500 meter di atas permukaan air laut, meliputi Kecamatan Nanggulan, Sentolo, Pengasih, dan sebagian Lendah, wilayah dengan lereng antara 2 15%, tergolong berombak dan bergelombang merupakan peralihan dataran rendah dan perbukitan.

c. Bagian Selatan

Merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0 100 meter di atas permukaan air laut, meliputi Kecamatan Temon, Wates, Panjatan, Galur, dan sebagian Lendah. Berdasarkan kemiringan lahan, memiliki lereng 0 2%, merupakan wilayah pantai sepanjang 24,9 km, apabila musim penghujan merupakan kawasan rawan bencana banjir.

Luas wilayah Kabupaten Kulon Progo adalah 58.627,54 hektar, secara administratif terbagi menjadi 12 kecamatan yang meliputi 88 desa dan 930 dusun. Penggunaan tanah di Kabupaten Kulon Progo, meliputi sawah 10.732,04 Ha (18,30%); tegalan 7.145,42 Ha (12,19%); kebun campur 31.131,81 Ha (53,20%); perkampungan seluas 3.337,73 Ha (5,69%); hutan 1.025 Ha (1,75%); perkebunan rakyat 486 Ha (0,80%); tanah tandus 1.225 Ha



(2,09%); waduk 197 Ha (0,34%); tambak 50 Ha (0,09%); dan tanah lain-lain seluas 3.315 Ha (5,65%).

Kabupaten Kulon Progo dilewati oleh 2 (dua) prasarana perhubungan yang merupakan perlintasan nasional di Pulau Jawa, yaitu jalan Nasional sepanjang 28,57 km dan jalur Kereta Api sepanjang kurang lebih 25 km. Hampir sebagian besar wilayah di Kabupaten Kulon Progo dapat dijangkau dengan menggunakan transportasi darat.

4.1.3 Kependudukan di Kabupaten Kulon Progo

Penduduk Kabupaten Kulon Progo berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2017 sebanyak 421.295 jiwa yang terdiri atas 207.245 jiwa penduduk laki-laki dan 214.050 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2016, penduduk Kulon Progo mengalami pertumbuhan sebesar 1,11 persen dengan masing-masing persentase pertumbuhan penduduk laki-laki sebesar 1,18 persen dan penduduk perempuan sebesar 1,04 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2017 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 96. Kepadatan penduduk di Kabupaten Kulon Progo tahun 2017 mencapai 719 jiwa/km². Kepadatan Penduduk di 12 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Wates dengan kepadatan sebesar 1.514 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Samigaluh sebesar 381 jiwa/Km².



Gambar 4. 1. Jumlah Penduduk Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015-2017

Kecamatan Subdistrict	Jumlah Penduduk Population			Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun Annual Population Growth Rate (%)
	2015	2016	2017	2000-2010
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Temon	26 255	26 603	26 960	0,81
2. Wates	47 197	47 821	48 463	0,81
3. Panjatan	35 633	36 067	36 512	0,70
4. Galur	30 767	31 081	31 405	0,51
5. Lendah	38 822	39 282	39 753	0,67
6. Sentolo	47 676	48 289	48 920	0,77
7. Pengasih	48 466	49 109	49 768	0,81
8. Kokap	32 058	32 224	32 396	-0,57
9. Girimulyo	22 624	22 755	22 891	-0,24
10. Nanggulan	29 029	29 376	29 731	0,68
11. Kalibawang	27 736	27 905	28 080	0,10
12. Samigaluh	25 935	26 171	26 416	0,05
Kulon Progo	412 198	416 683	421 295	0,48

Sumber/Source: Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi DI Yogyakarta / Population Projection Regency/City of DI Yogyakarta Province)



Gambar 4. 2 Jumlah Penduduk Kabupaten Kulon Progo Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin

Kelompok Umur Ages Group	Laki-laki Male	%	Perempuan Female	%	Jumlah Total	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0 - 4	15 902	7,67	15 246	7,12	31 148	7,39
5 - 9	16 293	7,86	15 545	7,26	31 838	7,56
10 - 14	16 741	8,08	15 633	7,30	32 374	7,68
15 - 19	13 761	6,64	12 395	5,79	26 156	6,21
20 - 24	10 217	4,93	10 562	4,93	20 779	4,93
25 - 29	14 597	7,04	15 034	7,02	29 631	7,03
30 - 34	14 678	7,08	14 472	6,76	29 150	6,92
35 - 39	14 240	6,87	14 233	6,65	28 473	6,76
40 - 44	15 354	7,41	15 322	7,16	30 676	7,28
45 - 49	15 565	7,51	15 962	7,46	31 527	7,48
50 - 54	14 450	6,97	15 479	7,23	29 929	7,10
55 - 59	12 589	6,07	14 017	6,55	26 606	6,32
60 - 64	11 048	5,33	11 827	5,53	22 875	5,43
65 - 69	7 923	3,82	9 299	4,34	17 222	4,09
70 - 75	5 890	2,84	7 535	3,52	13 425	3,19
75 +	7 997	3,86	11 489	5,37	19 486	4,63
Jumlah/Total	207 245	100,00	214 050	100,00	421 295	100,00
Sumber Data	: Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi DI Yogyakarta					



Gambar 4. 3 Jumlah Penduduk Kabupaten Kulon Progo Berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin

Kecamatan <i>Subdistrict</i>	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>	<i>Sex Ratio</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Temon	13 254	13 706	26 960	97
2. Wates	23 836	24 627	48 463	97
3. Panjatan	17 855	18 657	36 512	96
4. Galur	15 587	15 818	31 405	99
5. Lendah	19 817	19 936	39 753	99
6. Sentolo	24 306	24 614	48 920	99
7. Pengasih	24 271	25 497	49 768	95
8. Kokap	16 023	16 373	32 396	98
9. Girimulyo	11 217	11 674	22 891	96
10. Nanggulan	14 450	15 281	29 731	95
11. Kalibawang	13 608	14 472	28 080	94
12. Samigaluh	13 021	13 395	26 416	97
<i>Jumlah/Total</i>	207 245	214 050	421 295	97

Sumber Data : Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi DI Yogyakarta
Source : Population Projection Regency/City of DI Yogyakarta Province



Laporan Akhir

Kajian Pengembangan Usaha KUMKM Kabupaten Kulon Progo

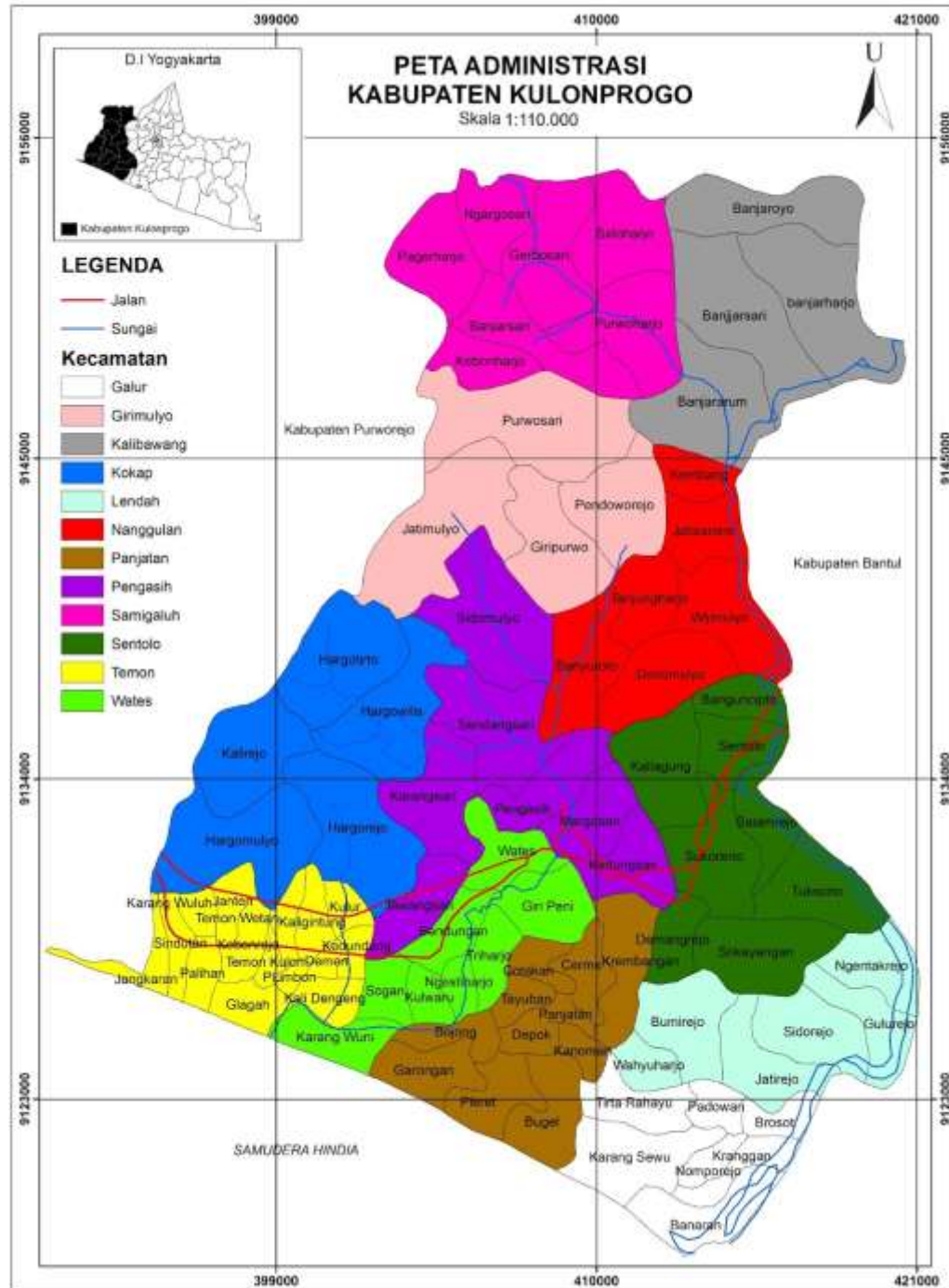
Gambar 4. 4 Luas Wilayah, Banyak Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Kulon Progo

Kecamatan Subdistrict	Luas Wilayah Total Area (Km ²)	Banyaknya Penduduk Population	%	Kepadatan Penduduk Per Km ² Population Density per Km ²
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Temon	36,30	26 960	6,40	743
2. Wates	32,00	48 463	11,50	1 514
3. Panjatan	44,59	36 512	8,67	819
4. Galur	32,91	31 405	7,45	954
5. Lendah	35,59	39 753	9,44	1 117
6. Sentolo	52,65	48 920	11,61	929
7. Pengasih	61,66	49 768	11,81	807
8. Kokap	73,80	32 396	7,69	439
9. Girimulyo	54,90	22 891	5,43	417
10. Nanggulan	39,61	29 731	7,06	751
11. Kalibawang	52,96	28 080	6,67	530
12. Samigaluh	69,29	26 416	6,27	381
Jumlah/Total	586,27	421 295	100,00	719

Sumber Data : Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi DI Yogyakarta
Source : Population Projection Regency/City of DI Yogyakarta Province



Gambar 4. 5 Peta Administrasi Kabupaten Kulon



Progo



4.2 Gambaran Umum Program RPJMD Kabupaten Kulon Progo

Pada dokumen RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022 disebutkan bahwa permasalahan utama terkait dengan pemberdayaan masyarakat yang menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat masih rendah adalah SDM belum kompetitif dan tingkat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah belum optimal. RPJP dilaksanakan dengan pencapaian dan keberlanjutan RPJMD Kabupaten Kulon Progo yang saat ini ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.

Pada RPJMD Kabupaten Kulon Progo aspek kesejahteraan masyarakat mendapatkan perhatian cukup besar. Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dapat diukur dengan pertumbuhan dan pemerataan PDRB, laju pertumbuhan ekonomi, dan angka kemiskinan. Selama ini PDRB selalu mengalami kenaikan, pada tahun 2016 tercatat PDRB mencapai 6,5 triliun rupiah dan tahun sebelumnya mencapai 6,28 triliun rupiah (sumber BPS 2017 dalam RPJMD 2017-2022). Laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 mencapai 4,76 persen, tahun sebelumnya 4,62 persen, diharapkan dengan pembangunan bandara YIA dan pembangunan KSPN Borobudur dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. PDRB perkapita juga mengalami kenaikan, pada tahun 2016 mencapai 20,145 juta rupiah dengan pertumbuhan rata-rata 7,87 persen. Ini memiliki arti bahwa daya beli masyarakat Kabupaten Kulon Progo semakin meningkat. Industri pengolahan harus mendapatkan



Laporan Akhir

Kajian Pengembangan Usaha KUMKM Kabupaten Kulon Progo

perhatian besar supaya produk lokal dapat terserap oleh pasar. Angka kemiskinan Kabupaten Kulon Progo masih menempati posisi paling tinggi diantara kabupaten/kota di DIY. Salah satu penyebab angka kemiskinan tinggi adalah keterbatasan keterampilan, tingkat pendidikan rendah, dan lapangan kerja sedikit.

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas Koperasi dan UMKM, Kabupaten Kulon Progo bekerjasama dengan para pihak mendirikan TOMIRA (Toko Milik Rakyat). Persaingan global juga mempengaruhi kegiatan perekonomian Koperasi dan UMKM di Kabupaten Kulon Progo. Permasalahan yang tampak pada Koperasi dan UMKM disebabkan belum optimalnya kinerja Koperasi dan UMKM. Strategi yang digunakan adalah perbaikan kebijakan yang dapat mempengaruhi kelembagaan, permodalan, dan pemberdayaan KUMKM agar dapat mandiri. Perkembangan pariwisata diharapkan dapat dimanfaatkan oleh KUMKM untuk meningkatkan kapasitas usahanya. Terkait permasalahan yang dihadapi dalam pertumbuhan dan pemerataan ekonomi disebutkan bahwa kualitas KUMKM dan kompetensi serta produktivitas SDM masih perlu ditingkatkan lagi.

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022 menetapkan visinya adalah: "Terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang sejahtera, aman, tenteram, berkarakter, dan berbudaya berdasarkan iman dan takwa". Sejahtera memiliki arti kecukupan kebutuhan masyarakat yaitu sandang, papan, pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Aman diterjemahkan menjadi terbebasnya masyarakat dari gangguan fisik dan fisik untuk mencapai kehidupan yang tenang dan damai. Ketenteraman masyarakat dapat mendukung proses



pembangunan yang hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat. Masyarakat dan pemerintah diharapkan mampu memiliki jiwa kebangsaan yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, toleran, gotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang dijiwai Pancasila. Masyarakat juga diharapkan memiliki nilai-nilai adiluhung budaya yang terwujud dalam perilaku kehidupannya. Semua upaya dan hasil pembangunan dilandasi dengan kebenaran nilai-nilai agama yang menjadi pedoman dan tuntunan kehidupan.

Dalam pencapaian visi tersebut, Kabupaten Kulon Progo menetapkan empat misi, yaitu:

1. Mewujudkan SDM yang sehat, berprestasi, mandiri, berkarakter, dan berbudaya,
2. Menciptakan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan,
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang aman, tertib, dan tenteram, dan
4. Mewujudkan pembangunan berbasis kawasan dengan mengoptimalkan sumber daya alam dan didukung teknologi serta infrastruktur yang berkualitas.

Tujuan pembangunan dalam RPJMD dirumuskan menjadi:

1. Terwujudnya SDM yang berkualitas;
2. Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
4. Mewujudkan keamanan, ketertiban, dan ketenteraman lingkungan;



5. Terwujudnya pembangunan kawasan berkelanjutan.

Sasaran pokok untuk mencapai tujuan ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat;
2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
3. Meningkatnya pelestarian/pengembangan budaya dan prestasi generasi muda;
4. Meningkatnya pendapatan masyarakat;
5. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel;
6. Meningkatnya kedisiplinan, ketertiban, dan kehidupan bermasyarakat yang kondusif;
7. Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung performa wilayah;
8. Meningkatnya pengelolaan kualitas lingkungan hidup; dan
9. Meningkatnya pengendalian tata ruang.

Korelasi visi, misi, tujuan, dan sasaran terkait dengan pengembangan usaha KUMKM adalah peningkatan kualitas SDM, peningkatan pendapatan masyarakat melalui pemerataan pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan, dan pembangunan ekonomi berbasis kawasan. Peningkatan kualitas SDM dapat diartikan secara luas, tetapi untuk pengembangan usaha KUMKM memiliki arti peningkatan kapasitas SDM melalui kewirausahaan dan kompetensi bisnisnya. Ekonomi berbasis kerakyatan dimaknai sebagai partisipasi masyarakat untuk mandiri secara ekonomi.



Laporan Akhir

Kajian Pengembangan Usaha KUMKM Kabupaten Kulon Progo

Perhatian terhadap pemberdayaan kawasan perekonomian yang berkelanjutan juga menjadi perhatian Kabupaten Kulon Progo untuk mencapai tujuan dan sasarannya



BAB V

HASIL DAN ANALISIS

5.1 Analisa Kondisi UMKM di Kabupaten Kulon Progo

UMKM di Kabupaten Kulon Progo memiliki potensi untuk dikembangkan. Sektor UMKM merupakan salah satu aset daerah Kabupaten Kulon Progo dan harus terus dikembangkan. Terdapat banyak keuntungan yang diperoleh dari keberadaan UMKM, di antaranya adalah mampu mengurangi pengangguran dan kemiskinan, pemerataan pendapatan hingga pembangunan ekonomi di pedesaan. Sektor UMKM juga merupakan salah satu potensi daerah yang harus dikembangkan dalam upaya meningkatkan dan menumbuhkan perekonomian menuju kemandirian ekonomi berbasis kerakyatan.

Saat ini salah satu upaya pemberdayaan UMKM yang dilakukan di Kabupaten Kulon Progo adalah dengan masuk ke jejaring toko modern Toko Milik Rakyat (Tomira). Hingga saat ini sedikitnya telah ada 18 toko modern berjejaring berskala nasional yang berhasil diakuisisi dan menjalin kemitraan dengan Koperasi di Kulon Progo menjadi Tomira. Keberadaan Tomira selama ini dinilai mampu meningkatkan produksi sekaligus omset pelaku UMKM di Kulon Progo. Bahkan hingga akhir 2017 lalu telah ada 110 produk UMKM yang masuk ke Tomira.

Adapun program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo saat ini dalam pengelolaan UMKM



Laporan Akhir

Kajian Pengembangan Usaha KUMKM Kabupaten Kulon Progo

adalah dengan pelaksanaan pengembangan permodalan UMKM, peningkatan kualitas kelembagaan dan pengawasan UMKM serta pemberdayaan UMKM. Program pengembangan permodalan UMKM di antaranya adalah peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama UMKM dan pemantauan pengelolaan dana pemerintah bagi UMKM. Adapun program peningkatan kualitas kelembagaan dan pengawasan UMKM yaitu penyusunan data UMKM sedangkan untuk pemberdayaan melalui kegiatan pengembangan SDM dan Usaha KUMKM. Selanjutnya diperlukan program serta kegiatan yang lebih luas untuk meningkatkan kemandirian UMKM di Kabupaten Kulon Progo.

DPRD Kabupaten Kulon Progo mendorong pemerintah setempat untuk melakukan revitalisasi UMKM karena dipandang mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekitar. Kendala utama yang dihadapi oleh UMKM khususnya pelaku usaha mikro adalah sumber daya manusia yang rendah serta tidak memiliki keterampilan dalam mendesain produk yang dapat menarik pasar. Oleh karenanya diperlukan kebijakan strategis untuk melakukan pengembangan UMKM di Kabupaten Kulon Progo. Kondisi lainnya yang dihadapi UMKM di Kabupaten Kulon Progo adalah kendala permodalan. Pelaku UMKM tidak memiliki modal dalam jumlah yang banyak dan pada umumnya menggunakan uang pribadi dalam mengembangkan usaha. Sehingga diperlukan skema permodalan bagi pelaku usaha UMKM. Permasalahan lain yang dihadapi UMKM di Kabupaten Kulon Progo adalah masalah pemasaran manajemen pengelolaan keuangan.



Dengan melihat potensi yang dimiliki UMKM Kabupaten Kulon Progo namun juga di sisi lain terdapat beberapa kendala yang dimiliki UMKM maka diperlukan adanya pengembangan UMKM di Kabupaten Kulon Progo dengan langkah yang jelas, terarah dan konkrit. Langkah tersebut tentunya memerlukan dukungan pemerintah melalui kebijakan, program hingga dukungan dana dari pemerintahan.

5. 2 Analisis Kondisi Ekonomi Kreatif di Kabupaten Kulon Progo

Ekonomi kreatif di Kabupaten Kulon Progo belum terpetakan secara komprehensif karena belum pernah dilakukan penelitian atau kajian yang lengkap. Namun secara sekilas dapat diketahui bahwa Kabupaten Kulon Progo memiliki potensi yang dapat dikembangkan melalui kegiatan ekonomi kreatif. Syarat terbentuknya ekonomi kreatif adalah terdapat aktor dan ekosistem yang mendukung kegiatan ekonomi berbasis kreativitas. Pada era ekonomi kreatif ini lebih ditekankan untuk menjual produk yang dihasilkan dari ide-ide kreatif.

Pada tulisan media online indiekras (18 Juli 2018) dituliskan beberapa potensi yang dimiliki Kabupaten Kulon Progo, yaitu : (1) kebijakan pemerintah yang mendorong ekonomi kerakyatan, misalnya Bela Beli Kulon Progo, (2) potensi gula semut yang telah memiliki IG cukup besar, dan (3) kopi mulai dikembangkan menjadi produk unggulan. Pada berita PMK3I Bekraf (15 September 2017) menuliskan bahwa pertumbuhan usaha batik sangat pesat



Laporan Akhir

Kajian Pengembangan Usaha KUMKM Kabupaten Kulon Progo

dengan diberlakukannya kebijakan pemakaian seragam pegawai negeri sipil dan pelajar di wilayah Kabupaten Kulon Progo.

Subsektor ekonomi kreatif yang dapat dikembangkan melalui kegiatan usaha KUMKM di wilayah ini antara lain kuliner, kriya, dan fashion. Paralel dengan pengembangan ekonomi kreatif dapat juga dikembangkan pariwisata sebagai sektor ekonomi yang dapat mendukung subsektor tersebut. Pengembangan subsektor tersebut harus melibatkan kreator-kreator yang mampu menginovasi produk-produk potensialnya. Penggunaan teknologi informasi dan digital merupakan hal yang tidak dapat dielakkan lagi.

Ekosistem bisnis ekonomi kreatif di Kabupaten Kulon Progo perlu didorong dan ditata lebih baik lagi. Rantai nilai ekonomi kreatif yang terdiri dari tahapan kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi terimplementasikan pada ekosistem tersebut. Secara kelembagaan ekonomi kreatif dikembangkan oleh pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sementara di daerah kelembagaan ini berada di berbagai OPD. Kondisi ini sering menyulitkan pemerintah daerah untuk menggerakkan ekonomi kreatifnya.

Keterlibatan aktor yang terdiri dari unsur pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media dikenal dengan konsep *pentahelix*. Di Kabupaten Kulon Progo belum memiliki kejelasan masing-masing peran aktor yang secara massif dapat menggerakkan pengembangan ekonomi kreatif. Kabupaten ini



memerlukan kelembagaan dan dokumen rencana pengembangan ekonomi kreatif yang jelas supaya hasil yang diperoleh dapat terukur.

Lazimnya suatu wilayah yang mengembangkan ekonomi kreatif, ruang-ruang kreatif yang menjadi tempat berkumpulnya aktor-aktor kreatif menjadi sarana yang sangat penting. Beberapa daerah sudah mengembangkan *creative economy hub* dan *coworking space* sebagai sarana ruang kreatif. Banyak juga daerah yang memanfaatkan ruang-ruang publik dijadikan ruang kreatif. Sementara ini ekonomi kreatif banyak melibatkan anak-anak muda untuk memiliki usaha kreatif. Indikator utamanya adalah munculnya *brand-brand* lokal yang biasanya dimiliki anak muda yang memiliki pangsa pasar lokal maupun global.

5.3 Hasil dan Analisis Berdasarkan Metode Penelitian

5.3.1 Hasil dan Analisis Observasi

Pada kajian ini telah dilakukan observasi pada beberapa komoditas dan wilayah yang memiliki potensi ekonomi untuk dapat digerakkan melalui KUMKM. Observasi yang dilakukan berdasarkan arahan dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo yang telah memiliki data tentang potensi tersebut.

Observasi pertama dilakukan untuk melihat potensi kerajinan anyaman serat alam seperti serat agel, serat pisang, enceng gondok, dan sebagainya. Kabupaten Kulon Progo memiliki perajin yang membuat



Laporan Akhir

Kajian Pengembangan Usaha KUMKM Kabupaten Kulon Progo

produk-produk serat alam untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal dan ekspor. Kerajinan serat alam ini telah berlangsung cukup lama diperkirakan mulai berkembang sejak tahun 1990an. Kerajinan serat alam ini pernah mengalami perkembangan pesat pada saat akhir tahun 90an. Pada saat itu angka ekspor kerajinan naik karena pengaruh nilai rupiah yang turun terhadap mata uang asing. Pasar kerajinan banyak bermuara di Bali melalui agen-agen perdagangan ekspor (*trading agent*). Sentra kerajinan serat alam ini berada di Desa Salamrejo, Kecamatan Sentolo yang mengalami masa kejayaan sampai tahun 2006. Pasca terjadinya gempa bumi di Yogyakarta tahun 2006, pesanan mulai turun sampai sekarang.

Permasalahan yang mereka hadapi adalah ketergantungan pada pengepul yang memberikan harga terlalu rendah. Ini terjadi karena perajin serat alam hanya menerima pesanan dari pengepul tanpa berupaya mencari pasar lain. Kemampuan dan motivasi berinovasi masih perlu ditingkatkan. Bantuan pengadaan desain baru dan akses pemasaran diperlukan untuk mendongkrak omset penjualan.



Gambar 5. 1 Produk Serat Alam di Salamrejo



Sumber: jogjainside

Observasi kedua adalah kerajinan tenun yang berada di Koperasi Tenun Mumbul, Desa Banjarasri, Kecamatan Kalibawang. Produk yang dibuat antara lain serbet, selimut, waslap, kain pel, dan sebagainya. Koperasi ini memiliki kerjasama dengan Yayasan Santa Maria Boro yang telah lama mengembangkan usaha tenun ATBM. Kendala yang ditemui adalah tenaga kerja yang semakin sulit dicari karena kesulitan menaikkan upah tenaga kerja. Produk ini menggunakan bahan benang yang diperoleh dari India (impor). Harga bahan relatif sudah sangat tinggi yang membebani ongkos produksi. Harga jual menjadi kurang kompetitif di pasar karena bersaing dengan tekstil buatan mesin. Inovasi produk membutuhkan biaya yang cukup besar terutama untuk *setting* alat tenun. Selama ini tenun ATBM ini memiliki pelanggan loyal yang berasal dari



rumah sakit atau asrama yang memerlukan produk Koperasi Tenun Mumbul.

Jika produk ini akan dikembangkan, maka diperlukan penambahan unit produksi dan strategi pemasaran yang tepat. Desain produk dengan narasi yang menunjang produk tenun ATBM juga perlu diinovasi sesuai dengan kebutuhan pasar. Jejaring produksi perlu diperkuat dengan melibatkan sentra-sentra produksi sejenis yang berada di wilayah Kabupaten Kulon Progo.

Ada potensi lain yaitu penenunan kain sutera yang berasal dari kepompong ulat Samia. Kain ini dikenal dengan nama kain tenun sutera Samia. Kain ini cukup prospektif jika memiliki harga kompetitif dibandingkan dengan jenis kain tenun lainnya. Penelitian dan pengembangan produk perlu dilakukan bekerjasama dengan perguruan tinggi agar proses produksi dari pemeliharaan ulat sampai dengan produk jadi memiliki nilai ekonomi. Pasar fashion sangat besar, ini dapat dijadikan target pengembangan tenun sutera Samia.

Observasi ketiga melihat potensi pariwisata yang dikembangkan pelaku usaha wisata. Kabupaten Kulon Progo dikenal memiliki potensi alam dan budaya yang dapat dijadikan objek wisata. Pelaku usaha pariwisata mulai tumbuh di beberapa tempat dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Pariwisata memiliki *multiplier effect* yang cukup luas sehingga dapat dijadikan pengungkit ekonomi masyarakat. Mereka mengembangkan



Laporan Akhir

Kajian Pengembangan Usaha KUMKM Kabupaten Kulon Progo

wisata dengan berbagai macam jenis usaha mulai dari kuliner, travel, persewaan jip wisata, home stay, kuliner, souvenir, dan sebagainya. Pelaku usaha tersebut melakukan bisnisnya melalui kelembagaan usaha koperasi dan usaha kecil dan menengah.

Terdapat wisata kuliner cukup menarik yang dapat membranding Kopi Menoreh, salah satunya kedai kopi milik Bapak Rohmat yang berada di Dusun Madigondo, Desa Sariharjo, Kecamatan Samigaluh. Kedai ini menawarkan suasana dan citarasa kopi khas Kulon Progo atau yang dikenal dengan nama kopi Menoreh. Nama kopi ini cukup dikenal luas, bahkan beberapa wisatawan dari manca Negara juga pernah menikmati kopi ini. Komoditas kopi di Indonesia saat ini baru digemari oleh masyarakat. Minum kopi menjadi gaya hidup, bukan sekedar memenuhi kebutuhan hidup saja. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo juga mencoba untuk membranding kopi dengan merek Starprog. Merek ini memang belum dikenal secara luas oleh masyarakat di luar wilayah Kulon Progo. Hal yang perlu dilakukan untuk mengembangkan kopi ini adalah kualitas produk, kemasan, dan kapasitas KUMKM dalam tata kelola usahanya.



Gambar 5. 2. Promosi Kopi Menoreh oleh Bupati Kulon Progo



sumber: jogjainside

Secara umum kondisi KUMKM yang dikunjungi memiliki permasalahan pengembangan pasar dan penguatan produksi. Bauran pemasaran yang mempertimbangkan faktor kualitas produk, harga kompetitif, kemudahan jangkauan distribusi, dan upaya promosi perlu dibuatkan strategi pengembangannya. Pemerintah yang memiliki fungsi fasilitator dan regulator diharapkan segera menyusun langkah-langkah strategis dengan mengedepankan aspek kolaborasi dengan para pihak. Sementara itu kebutuhan terhadap akses permodalan, teknologi tepat guna, tata kelola usaha, dan kelembagaan tetap juga mendapatkan perhatian dari semua pihak.



Perubahan yang terjadi akibat percepatan teknologi dan pergeseran gaya hidup juga mempengaruhi daya saing produk Kabupaten Kulon Progo. Sentra sebagai basis produksi masyarakat memerlukan peningkatan jejaring sehingga peran-peran simpul perekonomian dapat bersinergi secara maksimal. Penggunaan digital marketing hampir dipastikan pasti berimbas pada iklim usaha KUMKM. Adaptasi dan kolaborasi sangat penting bagi KUMKM untuk mendorong keberlanjutan usaha dengan mengedepankan daya saing produknya.

5.3.2 Hasil dan Analisis Focus Group Discussion (FGD)

Salah satu pengambilan data yang dilakukan dalam kajian ini ialah melalui Focus Group Discussion (FGD). FGD dilakukan pada tanggal 14 November 2019 di Dinas Koperasi dan dan UKM Kulon Progo. Kegiatan ini merupakan salah satu momentum bertemunya antar *stakeholder* untuk melaksanakan diskusi dengan fokus kajian yaitu strategi pengembangan UMKM di Kulon Progo.

Adapun *stakeholder* yang hadir pada saat dapat dilihat dalam Tabel 5.1 yaitu 9 orang dari pemerintah yaitu perwakilan masing-masing dinas dan BAPPEDA, 2 orang dari akademisi, 6 orang dari pelaku UMKM Kabupaten Kulon Progo, 1 orang dari praktisi yaitu dari Koperasi, serta 5 orang dari komunitas.



Tabel 5. 1 Peserta Focus Group Discussion

No	Peran	Jumlah (orang)
1.	Pemerintah	9
2.	Akademisi	2
3.	Pelaku Usaha	6
4.	Praktisi	1
5.	Komunitas	5
Total		23

Sumber: Data Lapangan

Gambar 5. 3 Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD)



Sumber; Data lapangan

Berdasarkan FGD yang telah dilakukan, dapat ditarik benang merah beberapa permasalahan yang dihadapi pelaku UMKM Kabupaten Kulon Progo di antaranya adalah:



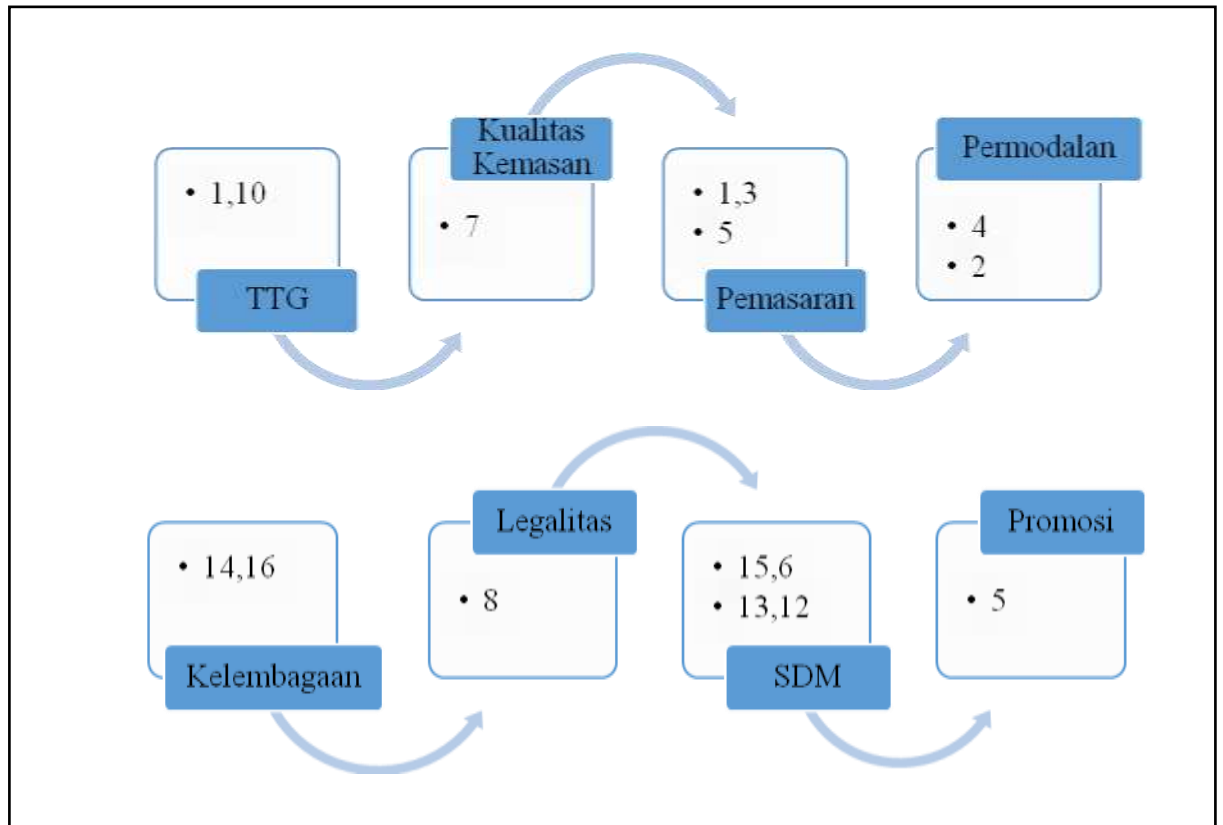
Laporan Akhir

Kajian Pengembangan Usaha KUMKM Kabupaten Kulon Progo

1. Finishing produk dilakukan di luar Kabupaten Kulon Progo sehingga hanya mampu memproduksi barang setengah jadi
2. Belum memiliki gerai produksi
3. Belum menguasai digital marketing atau pemasaran secara online
4. Keterbatasan modal usaha
5. Keterbatasan akses pasar
6. Kurangnya jiwa entrepreneurship pada pelaku UMKM
7. Kurangnya branding sehingga menjadi penghambat proses pemasaran
8. Adanya kendala dalam proses legalitas produk atau perizinan baik untuk produk berskala nasional maupun internasional (ekspor)
9. Kurangnya inovasi produk
10. Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi (TI)
11. Kurangnya bahan baku produksi
12. Kurangnya rencana pengembangan usaha
13. Pelaku UMKM kurang siap dalam menghadapi perubahan
14. Tidak ada kelembagaan untuk UMKM
15. Kurangnya regenerasi pengusaha muda
16. Tingginya pajak bagi UMKM



Gambar 5. 4. Garis Besar Permasalahan UMKM di Kabupaten Kulon Progo



Sumber: Studi Lapangan

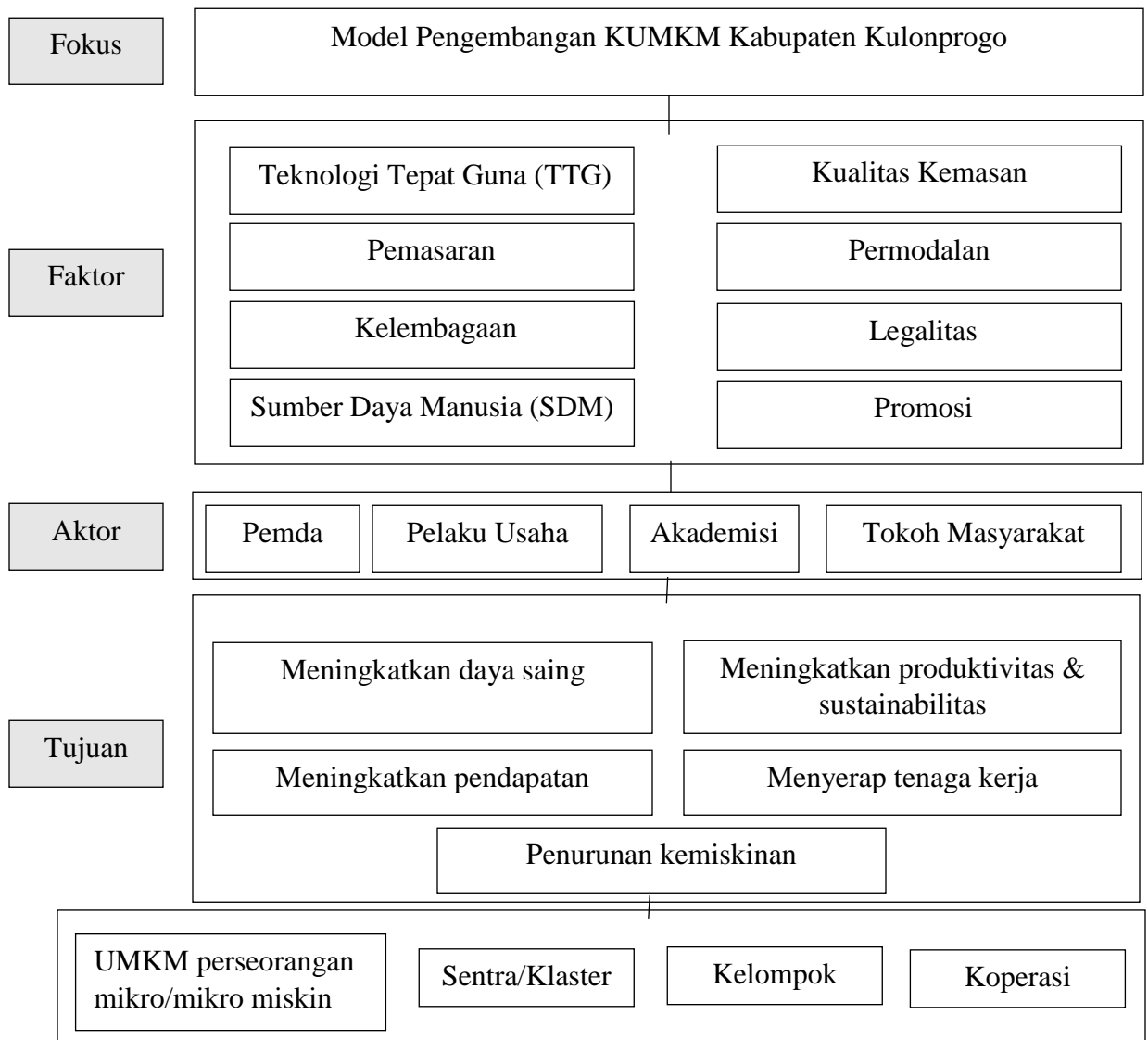
Sehingga apabila disimpulkan, diperlukan fokus penyelesaian masalah pada UMKM di Kabupaten Kulon Progo dalam beberapa aspek yaitu Teknologi Tepat Guna (TTG), kualitas kemasan, pemasaran, permodalan, kelembagaan, legalitas, SDM dan promosi. Fokus pada aspek tersebut harapannya dapat menyelesaikan beberapa permasalahan yang dihadapi UMKM Kabupaten kulon Progo. Berikut merupakan kerangka garis besar permasalahan UMKM di Kabupaten Kulon Progo dalam Gambar 5.4.



5. 4 Analisis Model Pengembangan UMKM di Kabupaten Kulon Progo

Berdasarkan langkah-langkah pengambilan data yang telah dilakukan baik dengan metode wawancara, desk study, observasi maupun FGD, maka disusunlah model pengembangan UMKM di Kabupaten Kulon Progo sebagaimana pada Gambar 5.5.

Gambar 5. 5 Model Pengembangan Usaha UMKM Untuk Mewujudkan Kemandirian di Kabupaten Kulon Progo



Sumber: Hasil penelitian lapangan



Pada umumnya terdapat beberapa faktor atau permasalahan yang dihadapi UMKM di Kabupaten Kulon Progo. Setelah dilakukan reduksi data data berbagai sumber, peneliti menyimpulkan terdapat tujuh aspek yang penting untuk dibahas agar UMKM Kabupaten Kulon Progo dapat berkembang. Aspek tersebut di antaranya adalah Teknologi Tepat Guna (TTG), kualitas kemasan, pemasaran, permodalan, kelembagaan, legalitas, Sumber Daya Manusia (SDM) dan promosi. Sehingga diperlukan langkah konkrit bagi UMKM untuk mengembangkan usahanya dengan melakukan *support system* khususnya terkait dengan tujuh aspek sebagaimana yang telah disebutkan. Adapun langkah-langkah konkrit tersebut dapat diwujudkan dengan aksi sebagaimana berikut:

1. Mendorong diversifikasi dan inovasi produk UMKM dengan memanfaatkan TTG

Diversifikasi dan inovasi produk merupakan hal penting untuk keberlanjutan usaha. Diversifikasi diperlukan untuk membedakan manfaat suatu produk dengan produk serupa lainnya. Sedangkan inovasi diperlukan untuk menjaga eksistensi produk tersebut di pasar. Sehingga diperlukan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk mendorong diversifikasi dan inovasi produk UMKM yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Dalam hal ini dapat dilakukan dengan adanya pelaksanaan beberapa kegiatan yaitu: fasilitas bimbingan teknis atau pelatihan pemanfaatan TTG bekerjasama dengan LIPI/lembaga/pihak lainnya; fasilitasi penerapan dan



pendampingan TTG dari LIPI/lembaga/pihak lainnya untuk produk UMKM unggulan Kulon Progo; serta bantuan sarana dan prasarana usaha.

2. Mendorong peningkatan kualitas dan desain kemasan kreatif UMKM

Kemasan produk merupakan salah satu faktor yang menjadi daya tarik produk. Produk yang memiliki kemasan menarik pada umumnya akan mampu bersaing di pasar dengan penjualan yang kompetitif. Sehingga diperlukan adanya peningkatan kualitas serta desain kemasan yang kreatif untuk produk UMKM di Kabupaten Kulon Progo. Kegiatan yang dapat dilakukan untuk mendorong peningkatan kemasan produk UMKM di Kabupaten Kulon Progo di yaitu adanya fasilitasi bimbingan teknis atau pelatihan desain kemasan baik dari sisi warna, ukuran kemasan, kemasan yang sesuai dengan produk dan inovatif, kemasan yang menunjukkan identitas serta penciptaan brand. Kegiatan lainnya dapat dilakukan dengan adanya fasilitasi pendirian “rumah kemasan”.

3. Perluasan jaringan usaha dan pemasaran produk

Jaringan usaha merupakan hal penting dalam pemasaran. Produk yang bagus belum tentu dapat laku di pasar apabila pelaku usaha tidak mampu mengakses pasar. Oleh karenanya diperlukan jaringan usaha yang luas agar pemasaran produk UMKM Kabupaten Kulon Progo semakin luas. Diperlukan beberapa kegiatan untuk meningkatkan jaringan usaha di antaranya adalah: fasilitasi pemasaran UMKM secara offline maupun online (youtube, media sosial, marketplace, video sinematik UMKM, fashion show produk UMKM dan lain sebagainya); pendirian UKM



Center atau pusat informasi; optimalisasi produk UMKM masuk Tomira maupun toko modern; fasilitasi kemitraan antara UMKM dengan pengusaha besar atau pihak terkait lainnya; serta fasilitasi Kurasi Galeri UMKM di New Yogyakarta International Airport (NYIA)

4. Penguatan permodalan UMKM

Modal merupakan aspek penting bagi keberlanjutan usaha. Modal yang tidak memadai akan menjadi penghalang pelaku usaha untuk melakukan aktifitas produksi. Pada akhirnya, usaha yang kekurangan modal akan berada pada titik stagnan atau bahkan tidak berlanjut. Oleh karenanya diperlukan penguatan modal bagi UMKM di Kabupaten Kulon Progo. Beberapa kegiatan yang dapat dilaksanakan untuk memperkuat pemodalan UMKM di Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut: fasilitasi akses pinjaman dana bergulir dengan bunga rendah melalui pendirian Badan Layanan Umum Dana Bergulir; penyertaan modal pada kepada Bank Pasar Kulon Progo untuk selanjutnya dipinjamkan kepada Koperasi /UMKM dengan bunga yang rendah; serta pengembangan kemitraan permodalan dengan BUMN/Lembaga Pendanaan lainnya.

5. Penguatan kelembagaan KUMKM

Kelembagaan merupakan aspek penting dalam pengelolaan UMKM. Adanya kelembagaan dalam pengembangan UMKM akan meningkatkan berbagai aspek pengelolaan UMKM dari hulu hingga hilir. Oleh karenanya diperlukan pembentukan kelembagaan bagi UMKM di Kabupaten Kulon



Laporan Akhir

Kajian Pengembangan Usaha KUMKM Kabupaten Kulon Progo

Progo baik dalam bentuk kluster/sentra/kelompok maupun koperasi. Pembentukan kelembagaan disesuaikan berdasarkan aspek wilayah dan jenis produk. Penguatan kelembagaan dapat dilakukan dengan cara :

- a. Pembentukan kelembagaan usaha di Kulon Progo dalam skala usaha mikro, kecil, dan menengah atau lazim disebut UMKM dalam bentuk individu/klaster/sentra/kelompok maupun koperasi. Kelembagaan ini penting untuk keberlanjutan usaha dan memudahkan identifikasi skala usahanya.
- b. Perlindungan produk lokal unggulan produk khas yang ada di wilayah Kabupaten Kulon Progo. Adanya perlindungan produk unggulan dimaksudkan agar produk tersebut mampu terus berlanjut serta mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Salah satu contoh produk unggulan Kabupaten Kulon Progo adalah gula semut. Dalam rangka melakukan perlindungan produk lokal unggulan maka salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah adanya pengaturan tata kelola produk gula semut dan produk lokal lainnya dengan pembuatan Peraturan Bupati maupun Keputusan Bupati.
- c. Pengawasan dalam rangka perlindungan terhadap koperasi dan UMKM. Perlindungan ini diperlukan untuk menjaga agar lembaga usaha yang mayoritas dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Kulon Progo tidak kalah dengan usaha yang memiliki modal relatif lebih besar.



6. Perlindungan produk lokal unggulan

Produk unggulan merupakan produk khas yang ada di wilayah Kabupaten Kulon Progo. Adanya perlindungan produk unggulan dimaksudkan agar produk tersebut mampu terus berlanjut serta mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Salah satu produk unggulan Kabupaten Kulon Progo adalah gula semut. Dalam rangka melakukan perlindungan produk lokal unggulan maka salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah adanya pengaturan tata kelola produk gula semut dan produk lokal lainnya dengan pembuatan Peraturan Bupati maupun Keputusan Bupati.

7. Penguatan legalitas UMKM

Legalitas merupakan hal penting bagi keberadaan suatu produk. Produk yang sudah memiliki izin atau legal akan meningkatkan kepercayaan konsumen dalam mengkonsumsi produk tersebut. Sehingga harapannya mampu meningkatkan volume penjualan produk tersebut. Oleh karenanya diperlukan dukungan bagi UMKM di Kabupaten Kulon Progo untuk difasilitasi dalam perizinan usaha UMKM dan HAKI.

8. Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia

Sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu faktor produksi yang sangat berpengaruh terhadap hasil suatu produk. SDM yang *capable* dan kompeten akan melahirkan suatu produk yang berkualitas dan berdaya saing. Sehingga diperlukan adanya peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia UMKM di Kabupaten Kulon Progo. Langkah yang dapat dilakukan di antaranya adalah bimbingan teknis atau



pelatihan manajerial dan vokasional; magang dan pendampingan; pelatihan bagi wirausaha pemula; serta peningkatan semangat dan jiwa entrepreneurship bagi pelaku UMKM,

9. Peningkatan promosi produk UMKM

Promosi merupakan salah satu strategi pemasaran yang dilakukan untuk meningkatkan eksistensi produk. Diperlukan adanya peningkatan promosi bagi produk-produk UMKM Kabupaten Kulon Progo sehingga dikenal secara luas. Oleh karenanya diperlukan kegiatan berupa penyelenggaraan ataupun ikut serta dalam pameran tingkat regional, nasional maupun internasional serta adanya peningkatan branding produk UMKM.

Beberapa aspek yang menjadi permasalahan tersebut harus menjadi fokus pengembangan UMKM di Kulon Progo dengan adanya kolaborasi dan sinergitas antar stakeholder. Dalam hal ini setidaknya terdapat empat aktor penting yang dibutuhkan untuk sama-sama mengembangkan UMKM di Kabupaten Kulon Progo. Adapun aktor-aktor tersebut adalah pemerintahan daerah, pelaku usaha, akademisi serta tokoh masyarakat. Terlebih peran dari pemerintah daerah baik itu eksekutif maupun legislatif sangat diperlukan untuk mengembangkan UMKM Kabupaten Kulon Progo yaitu peran dari sisi regulasi dan fasilitasi.

Tujuan akhir dari pengembangan UMKM di Kabupaten Kulon Progo harapannya mampu meningkatkan daya saing UMKM baik dalam tingkat lokal, nasional bahkan internasional; meningkatkan produktivitas dan sustainabilitas UMKM; meningkatkan pendapatan UMKM secara mikro dan pendapatan daerah



Laporan Akhir

Kajian Pengembangan Usaha KUMKM Kabupaten Kulon Progo

secara makro; meningkatkan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Kulon Progo; sehingga pada akhirnya mampu mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan melakukan pendekatan daya juang, daya adaptif serta daya kolaboratif. Dari sisi kelembagaan, UMKM dapat dibentuk menjadi sentra/klaster, kelompok ataupun koperasi. Kelembagaan yang terbentuk dapat mempermudah UMKM di Kabupaten Kulon Progo secara bersama-sama melakukan pengembangan.



BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Kabupaten Kulon Progo memiliki banyak potensi produk yang dihasilkan oleh KUMKM yang memiliki pangsa pasar lokal, nasional, dan internasional. Beberapa produk KUMKM seperti kerajinan, kopi, gula semut, dan tenun ATBM telah mulai merambah pasar nasional dan internasional. Permasalahan utama yang dihadapi oleh KUMKM Kabupaten Kulon Progo adalah penetrasi pasar dan daya saing produk.

Kemampuan penetrasi pasar dan daya saing produk KUMKM Kabupaten Kulon Progo perlu ditopang oleh faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu, akses teknologi tepat guna, kemasan produk, pemasaran, permodalan, kelembagaan, legalitas, SDM, dan promosi. Strategi pengembangan usaha KUMKM perlu mempertimbangkan peningkatan daya saing, daya juang, dan daya adaptasi agar dapat meningkatkan kapasitas usaha dan menjaga keberlanjutan usahanya.

Pengembangan usaha KUMKM diharapkan mampu memberikan dampak pada peningkatan daya saing, pendapatan dan produktivitas, pendapatan, penyerapan tenaga kerja, dan penurunan angka kemiskinan. Pendekatan yang dilakukan dalam pengembangan ini adalah ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif yang telah nyata memberikan dampak positif bagi KUMKM khususnya di Kabupaten Kulon Progo.

Upaya pengembangan usaha KUMKM dapat dijabarkan dengan berbagai macam kegiatan yang dapat menyelesaikan permasalahan KUMKM Kabupaten Kulon Progo. Pemerintah dapat menggunakan kewenangannya dalam memberikan fasilitasi dan regulasi yang berdampak pada peningkatan kualitas produk dan kapasitas KUMKM untuk dapat mengoptimalkan ekosistem bisnisnya.



6.1 Rekomendasi

- a. Pemerintah dapat bersinergi dengan para pihak untuk meningkatkan kapasitas KUMKM agar dapat mendorong daya saing produknya.
- b. Pada peningkatan kualitas dan kapasitas produk, pemerintah dapat memberikan fasilitasi akses teknologi tepat guna sesuai dengan perkembangan teknologi dan kemampuan KUMKM.
- c. Pangsa pasar dapat diraih dengan upaya penguatan jejaring pasar, promosi dan branding, serta pendirian pusat informasi KUMKM. Produk KUMKM juga perlu diberi kemasan yang lebih baik agar diminati pasar. Penguatan jejaring dengan toko modern, termasuk TOMIRA dapat dilakukan yang disertai perbaikan kualitas produk dengan cara memberikan kurasi produk.
- d. Masalah permodalan dapat dicarikan solusinya dengan membuat kemitraan dengan BUMN/lembaga pembiayaan lainnya. Disamping itu perlu dibentuk BLU dana Bergulir serta pinjaman modal kepada Koperasi melalui Bank Pasar Kulon Progo.
- e. Kelembagaan UMKM dapat didorong melalui optimalisasi klaster/sentra/kelompok dan koperasi. Khusus produk unggulan dapat diberikan penguatan dengan pengaturan tata kelola melalui Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati. Perlindungan terhadap produk KUMKM juga dapat difasilitasi dengan penguatan legalitasnya, misalnya kemudahan perijinan, HKI, dan sebagainya.
- f. Kunci utama pengembangan usaha KUMKM terletak pada peningkatan kapasitas dan kualitas SDM. Peningkatan ini dapat dilakukan dengan berbagai macam



pelatihan, magang, dan pendampingan. Semangat kewirausahaan dan kompetensi tata kelola usaha serta kompetensi produksi merupakan materi peningkatan kapasitas dan kualitas SDM.

- g. Kegiatan yang direkomendasi untuk dilaksanakan adalah :
- i. Bimbingan teknis atau pelatihan TTG
 - ii. Pendampingan penggunaan TTG
 - iii. Bantuan sarana dan prasarana TTG
 - iv. Bimbingan teknis atau pelatihan desain kemasan
 - v. Pendirian rumah kemasan
 - vi. Fasilitasi marketing online
 - vii. Pendirian UKM center
 - viii. Standarisasi dan optimalisasi produk untuk masuk TOMIRA
 - ix. Kemitraan dengan pengusaha besar
 - x. Kurasi produk untuk Galeri KUMKM di YIA
 - xi. Pendirian BLU Dana Bergulir
 - xii. Penyertaan modal ke Bank Pasar KP untuk penyaluran modal kepada KUMKM dengan bunga rendah
 - xiii. Kemitraan permodalan/pembiayaan dengan BUMN/lembaga lainnya
 - xiv. Penguatan UMKM melalui bentuk perseorangan/klaster/sentra/kelompok/koperasi
 - xv. Fasilitasi perijinan
 - xvi. Fasilitasi HKI



Laporan Akhir

Kajian Pengembangan Usaha KUMKM Kabupaten Kulon Progo

- xvii. Bimbingan teknis/pelatihan manajerial dan vokasional/kompetensi produksi
- xviii. Magang dan pendampingan
- xix. Pelatihan wirausaha pemula
- xx. Pelatihan kewirausahaan dan AMT
- xxi. Fasilitasi pameran lokal, nasional, dan internasional
- xxii. Penguatan branding produk KUMKM
- xxiii. Pembentukan Destinasi UMKM
- xxiv. Pengawasan dan pendampingan dalam rangka perlindungan UMKM



DAFTAR PUSTAKA

- Akdon dan Riduwan. 2005. Rumus dan Data dalam Aplikasi Statistika. Bandung: Alfabeta.
- BPS Kota Yogyakarta. 2014. Buku Saku Kota Yogyakarta 2014. Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta. Yogyakarta
- Creswell. John W. 2010. Research Design Pendekatan Kualitatif. Kuantitatif dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hakim. Vita Amaliah. 2013. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi. Universitas Siliwangi
- Handoko. Sri P. SE. 2013. Analisis Tingkat Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Daerah Kota Pontianak. Jurnal Ilmiah Program Magister Ilmu Ekonomi Universitas
- Prakosa. (2004). Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah (studi empirik di wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DIY). JAAI Vol.8 No.2
- Pudyatmoko. Y. Sri 2002. Pengantar Hukum Pajak. Andi. Yogyakarta. h.5
- Salim. Peter et al. 1991. Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer. Modern English Press. Jakarta. h. 127
- Siahaan. Marihot P 2005. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Ed. 1. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. hal. 42.
- Sugiyono.(2011).Metode penelitian pendidikan. Bandung:Alfabeta
- Sutalaksana. I. Z.. dkk (1979). Teknik Tata Cara Kerja. Departemen Teknik Industri. ITB: Bandung
- Sutimbul. 1993. Pendapatan Daerah di daerah Tingkat II. Pusat Penelitian Dan Pengembangan Desa Lembaga Penelitian. Surakarta: Universitas Sebelas Maret. Surakarta
- Pemerintah Indonesia. 1992. Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian . Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1992, Sumber : LN 1992/116; TLN NO. 3502
- Pemerintah Indonesia. 2008. Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866